

MERUBAH INDONESIA

THE STORY OF BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Tidak
Selamanya
Orang Miskin
Dilupakan



PENGANTAR

TUNTUTLAH ILMU HINGGA KE NEGERI CHINA!

Saya sempat membaca cepat naskah buku biografi A Hok alias Basuki Tjahaya Purnama. Ia mengingatkan saya kepada almarhum Soe Hok-gie, adik Soe Hok-djin (Arief Budiman) yang dari aktivis menjadi golput hingga meninggalnya akibat gas beracun di Gunung Semeru. Bedanya tentu saja, A Hok langsung terjun ke politisi, sedang Hok-gie frustrasi dengan langkah para tokoh demonstran Angkatan 66 yang menjadi anggota DPR. Bersama rekan kampus yang kritis, Soe Hok-gie mengirim kado lipstick kepada Presidium KAMI Pusat yang duduk di anggota DPR. Setelah adiknya gugur, Arief Budiman yang tadinya lebih bergerak dibelakang layar, terjun sebagai aktivis memimpin Golongan Putih yang memprotes pemilu zaman Soeharto yang dianggap tidak memberi peluang kepada calon yang berpotensi menjadi oposisi dan pesaing Soeharto untuk maju.

Basuki berlatar belakang Kristen dan konsisten ingin menerapkan iman dan doktrin agama tentang benar atau baik, haram atau halal secara konsisten dalam menyikapi praktek KKN dalam berpolitik. Ia mencari makna dan berargumentasi dengan pelbagai kaya bersayap dari Al Quran maupun Injil. Salah satu ialah yang saya kutip sebagai judul

Pengantar ini. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Ia sibuk berdiskusi tentang kenapa ayat itu muncul. Saya pikir Nabi Muhamad adalah seorang strateg dan politisi ulung yang mengetahui bahwa iptek merupakan rahasia keunggulan suatu bangsa. Kalau orang mau maju harus menguasai iptek karena ia tahu Tiongkok adalah negara yang teknologi dan peradabannya maju waktu itu yang setara dengan Romawi, maka walaupun penduduk Tiongkok bukan Muslim, tidak ada salahnya Muslim belajar dan menuntut ilmu dari Tiongkok. Ini merupakan pemikiran yang berwawasan jangka panjang. Tapi Tiongkok sendiri yang hingga dinasti Ming merupakan negara superpower, kemudian akan mengalami kemerosotan karena politik inward looking. Keputusan menyetop ekspedisi angkatan laut Zheng He, akan membuat posisi Timur (Asia) terpuruk. Sedang di Barat yang armadanya lebih butut disbanding Zheng He, akan terjadi lompat teknologi luar biasa akibat revolusi industri. Dari Timur, yang muncul sebagai penerobos sejarah ialah Meiji Tenno yang membalikkan ucapan Nabi Muhamad. Kalau di abad ke-7, Eropa

dianggap inferior disbanding China, maka di abad -19, Eropa menjadi kiblat modernisasi dan revolusi industri. Karena itu Meiji Tenno bersembayan harus rela dan berani menuntut ilmu, belajar dari Barat jika ingin menguasai teknologi modern.

Kata bersayap kedua yang dikutip Basuki persis dengan kata bersayap favorit yang saya

Peroleh dari almarhum Eka Darmaputra yaitu Amsal 30 ayat 7-10. Dengan berpegang pada ayat itu Basuki menjadi bupati yang mengharamkan korupsi dan memberdayakan anggaran yang secara tradisional melekat dengan privilege pejabat, untuk membeayai program pendidikan, kesehatan dan memberangkatkan jemaah haji.

Basuki sangat percaya diri dan terlalu cepat ingin mengejar karir ketingkat yang lebih tinggi dalam tempo yang relative singkat. Hanya menjadi bupati 16 bulan sudah mau jadi gubernur dan mengalami "politicking" yang menghentikan karirnya. Gagal menjadi gubernur, Basuki mendirikan CDT 31, pengalaman memasuki arena politik menjadi anggota DPRD dan Bupati melalui kampanye melawan isu SARA membuat Basuki optimis untuk mewariskan kiat tersebut kepada generasi muda Tionghoa yang baru saja

Memasuki euphoria Reformasi, memperoleh keleluasaan bergerak di bidang politik sejak terkebir di zaman Orde Baru.

Sejara harus dicatat bahwa ungkapan kebenaran adalah kebenaran, keadilan adalah keadilan dan jangan di kebir atau di geser dengan ukuran SARA berlaku secara inter komunal maupun intra-komunal.

Basuki mengancam diskriminasi terhadap keturunan dan SARA dan menganjurkan meritokrasi serta mengendorse gagasan UU Pembuktian Terbalik yang saya lontarkan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK tahun 2007. Pemimpin harus dipilih berdasarkan meritokrasi, kebersihan, kebolehan, ketrampilan dan profesionalisme. Jangan dijegal factor SARA sehingga yang akan terpilih bukan yang terbaik, melainkan terjelek, mantan pejabat korup gampang terpilih karena dihembuskan isu SARA.

Keberhasilan suatu bangsa hanya bisa terjadi bila kepemimpinan bangsa menjadi teladan, panutan dan memiliki kenegarawan yang luar biasa, menghargai dan dipilih karena meritokrasi sehingga kinerja bangsa akan berlipat secara sinergis. Kegagalan bangsa yang tidak menghargai meritokrasi ialah karena bercokolnya kepentingan penguasa atas dasar nepotisme,

kabalisme, tribalisme, kroni-isme dengan akibat negara dipimpin oleh klik

Yang tidak berprestasi optimal melainkan sekedar melanggengkan kekuasaan oknum dan

Pendukungnya. Mungkin bisa berhasil puluhan tahun seperti rezim Soeharto, tapi dampaknya memerlukan waktu panjang untuk memulihkan harkat martabat, moral dan etika dalam berpolitik agar tidak terus terbenam dalam pola KKN.

Buku Basuki ini tepat keluar ketika ia akan berkampanye menjadi caleg Golkar dari dapil Belitung. Mudah mudahan bisa menjadi salah satu bahan pengenalan pribadi dan terpulang kepada rakyat, apakah masih memakai pola SARA dalam memilih calon pemimpin atau sudah menghargai kinerja dan prestasi Basuki alias A Hok. Seperti dulu juga mahasiswa "asli" mengakui kepemimpinan Soe Hok-gie di Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Masyarakat keturunan juga bukan tipe satu keranjang partai dan aliran politik, melainkan juga majemuk seperti penduduk Indonesia "asli". Istilah "asli" memang perlu tanda kutip sebab jika ditelusuri dari jejak zaman purba migrasi dari Asia Tenggara daratan ke pulau Jawa maka tidak ada yang asli di Indonesia, kecuali "aborigin". Semua adalah pendatang yang kemudian mendirikan kerajaan kerajaan Hindu Budha seperti Taruma Negara, Syailendra, Mataram I, Singasari, Majapahit, dan Sriwijaya. Islam baru masuk sejak abad ke-14 pada era kemerosotan Majapahit.

Basuki adalah politisi generasi pasca Soeharto yang unik karena dengan "one man show" berhasil menerobos jadi Bupati, kalah sekali dalam pilgub Bangka Belitung dan gagal memperoleh tiket untuk cagub Sumut. Saya mengamati pertumbuhan tokoh cokin dari generasi umur 40an dan melihat keadilan Tuhan bahwa tidak akan ada kemusnahan generasi politisi Tionghoa.

Ketika Soeharto berkuasa, nyaris seluruh elite politik Tionghoa beraliran kiri dilumpuhkan dan mayoritas Tionghoa dikarantina hanya sebagai cukong dan hidup di sector bisnis. Tapi tetap saja ada orang Tionghoa yang muncul baik sebagai "dapur" Orde Baru seperti Harry Tjan dan Wanandi bersaudara maupun yang kritis dan diluar establishment seperti Arief Budiman, Kwik Kian Gie dan generasi saya.

Karena keterbatasan zaman Soeharto yang berlangsung 32 tahun, maka orang menganggap tidak akan ada generasi politisi

Tionghoa lagi yang muncul. Semua sibuk jadi konglomerat dan bisnis. Tapi seperti juga pada politisi pribumi, maka generasi lama Tionghoa juga terjun ke politik langsung seperti Murdaya suami istri. Generasi muda juga mulai terjun seperti anak atau menantu Ciputra, Hoo Liong Tiauw, dan pendatang baru serta figure yang muncul dari bawah dan tidak bergantung keluarga seperti A Hok.

Tuhan adil dan tidak pilih kasih, setiap zaman mempunyai tokoh dan tidak pernah kesepian atau tandus. Meskipun 32 tahun dijejalkan dalam keranjang bisnis sebagai

"economic animal", tetap bisa lahir seorang A Hok, seorang Andreas Harsono, di bidang pers, seorang Ivan Wibowo, seorang Ester Jusuf, dan belasan, puluhan serta ratusan bahkan saya yakin ribuan orang lain yang bisa meneruskan cita cita pembangunan bangsa Indonesia berdasar Meritokrasi, bukan atas dasar SARA.

Inilah situasi yang membuat saya tetap optimis akan masa depan Indonesia. Walaupun memang tetap waswas, bahwa jika orang-orang berprinsip kenegarawanan dari pelbagai suku, tetap saja dikalahkan oleh kleptokrat dan plutocrat pewaris Orde Baru Soeharto

Maka perjalanan Indonesia menjadi bangsa unggulan yang sukses mensejahterakan rakyatnya tentu akan tetap tersendat.

Indonesia akan bisa menjadi bangsa besar jika seluruh potensi nasionalnya berkiprah dengan semangat menghargai meritokrasi, agar tercapai sinergi kinerja yang luar biasa dalam mengangkat harkat dan martabat sesuai besaran kuantitatif sebagai bangsa keempat terbesar sedunia. Jika elite politik tetap bermain SARA dan mengabaikan Meritokrasi, maka Indonesia tidak akan pernah mentas tuntas dari keterpurukan dan keterbelakangan.

Buku ini perlu lebih disempurnakan dengan cerita pengalaman memangkas anggaran keperluan dinas perjalanan pribadi untuk dialihkan kepada kepentingan umum dan

Bila tidak sempat ditulis sendiri, mungkin ada editor yang berminat untuk menulis tentang A Hok alias Basuki yang menurut saya cukup unik untuk ditelusuri lebih jauh kiprah dan rahasia sukses ataupun kegagalannya.

Jakarta 22 September 2008

Christianto Wibisono

CONTENTS

BAB 01
Anak Ideologis
11

BAB 02
Dari Ketua Majelis ke Ketua Partai
20

BAB 03
Prophetical Voice Vs Political Voice
26

BAB 04
Pilih BTP Bukan Sara
37

BAB 05
Kewajiban Indonesia Tionghoa di Pemerintahan dan Politik
46

BAB 06
Belajar Sampai ke Negeri Tiongkok
56

BAB 07
NKRI VS USA
64

BAB 08
Sumpah Jabatan dengan Nama Tuhan (Yang Pikun?)
70



BAB 09
Bangsa Indonesia Semakin Miskin
80

BAB 10
Kesurupan Roh Arwah Kolonialisme
89

BAB 11
Merekrut Calon Kepala Daerah
96

BAB 12
Menghapus Praktik Curang
102

BAB 13
Karir Terbaik Untuk Kaum Idealis
108

BAB 14
Pidato Pilihan Selama Sebagai Bupati
(Catatan Sang Sekretaris Atas Pidato Tanpa Teks)
114

BAB 15
Ahok Harapan Rakyat Kecil
(Catatan Kekaguman Seorang Sekretaris
Terhadap Perjalanan Hidup Sang Pemimpin)
118





WRITER'S NOTE

TERIMAKASIH terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menganugerahkan kehidupan penuh dinamika ini kepada saya. Semoga saya memiliki kemampuan untuk membuat hidup ini berguna bagi sesama.

Kepada tim, kolega beserta sahabat yang telah mendorong sekaligus membantu saya untuk membuat buku ini sebagai alat pemberi inspirasi bagi semua orang agar mau terjun ke dunia politik secara baik dan benar serta tidak melupakan tujuan utamanya, untuk mensejahterakan rakyat banyak.

Terakhir, kepada istri tercinta yang 'memaksa' saya untuk mengubah bentuk awal buku yang semula hanya memiliki tampilan biasa sehingga dapat hadir dengan wujud yang cukup unik seperti ini.

Kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan pemimpin Bersih Transparan Profesional (BTP) dan konsisten terhadap pilihannya.

Salam hangat,

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta 17-08-2008

Merubah Indonesia

Editor :
Jani Ginting
Yasnovita
Tim Center for Democracy and Transparency

Photographer :
Adimodel
Turida Wijaya

Art Director :
Aja Muhammad Zuhri

Production :
Dedy Damping

Communication Concept :
Allrets Daniel Sumarauw

Creative Director :
Erikar Lebang

Penerbit
Center for Democracy and Transparency



01

ANAK IDEOLOGIS

Kristus, yang biasanya disebut beragama Kristen) menjadi pemimpin mereka.

Sedangkan dari masyarakat yang pro terhadap saya, di antaranya terdapat seorang pedagang ikan di pasar. Ia sebenarnya termasuk "orang yang

tidak berpendidikan" karena tidak memiliki kesempatan menamatkan pendidikan dasar. Namun, kecerdasannya menganalisa persoalan yang ada di sekitarnya tidaklah kalah dibanding orang yang berpendidikan sekalipun.

"Kalau kalian tidak mau memilih Ahok menjadi bupati, maka 10 tahun lagi pun kita tidak akan

memiliki seorang seperti Ahok yang mau jadi bupati di kampung kita". Begitulah ia melontarkan hasil analisisnya kepada masyarakat di sekitarnya yang kemudian sampai ke telinga saya.

Sekalipun pada awalnya saya merasa pernyataan-pernyataan itu terlalu berlebihan dalam membela dan menggambarkan diri saya, tetapi setelah melalui proses pemikiran *kontemplatif*, saya mulai menyadari apa yang dimaksud oleh pedagang ikan itu.

Mungkin, ia bermaksud mengatakan bahwa sulit untuk menyiapkan seorang calon bupati berusia produktif 38 tahun, seperti usia saya saat itu, dalam waktu 10 tahun mendatang. Karena kesiapan saya untuk mencalonkan diri sebagai bupati ketika itu, diawali dari seorang

pemuda (bapak saya) yang sejak berusia muda telah bercita-cita menjadi seorang pejabat agar mampu mensejahterakan rakyat. Sekalipun cita-cita mulia itu harus dia lupakan karena faktor ekonomi yang mengharuskan beliau bekerja keras membentuk putra-putrinya agar meneruskan dan mewujudkan cita-cita itu. Dan, usaha keras bapak itu, akhirnya terwujud ketika saya dipercaya rakyat untuk memimpin dengan otoritas sebagai bupati di daerah yang demikian saya kenal, yaitu Kabupaten Belitung Timur.

Kenyataan itu pulalah yang membuat saya kemudian mengamini istilah yang dialamatkan seorang pejabat tersebut bahwa saya adalah anak ideologis bapak.

Kamu ini benar-benar anak ideologis bapakmu", begitu kata seorang pejabat di Bangka Belitung ketika kami bertemu dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Saat itu, saya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

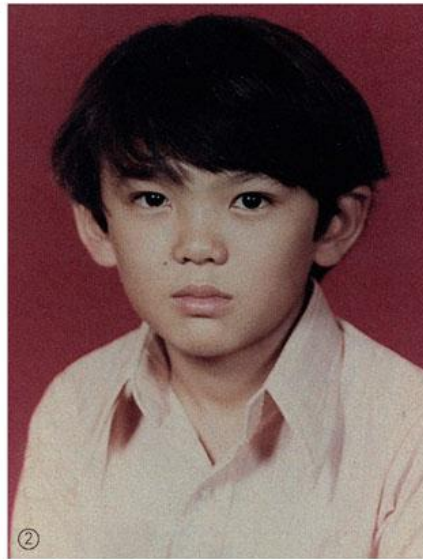
Pernyataan sang pejabat itu tentu mengejutkan saya.

Tapi, karena pejabat tersebut sangat mengenal pribadi bapak saya, yakni Tjung Kim Nam (Indra Tjahaja Purnama), dan mengetahui secara persis apa yang bapak saya cita-citakan serta harapkan dari kami putra-putrinya untuk kesejahteraan rakyat, saya kemudian merenungi makna di balik perkataan tersebut.

Saya lantas teringat masa ketika saya menyatakan hendak menjadi Calon Bupati Belitung Timur, dimana kala itu sempat menuai pro dan kontra cukup sengit.

Kelompok rasialis menyatakan tidak sudi menerima "orang China". Padahal, sesungguhnya tidak ada orang China di Indonesia. Yang ada orang Indonesia keturunan nenek moyangnya dari Republik Rakyat China, atau turunan ras Mongoloid). Selain itu, dari kelompok yang kontra ini juga mengalir ketidaksetujuan menerima "orang Kristen" sebagai Bupati. Padahal, saya bukan orang Kristen, tetapi orang Indonesia yang beriman kepada Nabi Isa Tuhan Yesus

① Menirjau pulau Belitung dari udara bersama dengan komandan Lanud Belitung.
② BTP kecil, anak ideologis optimis sejak kecil.





DITEMPA DI MEJA MAKAN

Umumnya, anak-anak kecil memperoleh transmisi pendidikan moral, wejangan dan nasehat di malam hari sebelum tidur. Tapi sistem pendidikan yang berlaku di keluarga kami cukup berbeda. Di kamar tidur, kami hanya bermain-main seperti kuda-kudaan dengan diselingi soal tanya-jawab. Khusus wejangan dan pengajaran dari bapak dilakukan di meja makan. Karenanya, saya sendiri dan 3 adik kandung, masing-masing Basuri T. Purnama, Fifi Lety dan Harry Basuki, selalu diwajibkan makan bersama dengan posisi duduk yang sama dari hari ke hari.

Bapak memiliki alasan tersendiri menempa kami dengan wejangan dan pengajaran di meja makan. Bapak berpendapat bahwa jika dilakukan di tempat tidur, kami putra-putrinya cenderung tidak konsentrasi karena sudah bersiap-siap untuk tidur. Sedangkan transmisi pendidikan moral dan wejangan di meja makan akan lebih sempurna karena konsentrasi kami masih segar.

Tema-tema perbincangan di meja makan mulai dari kisah Tiongkok kuno sampai semua masalah aktual yang dihadapi rakyat. Dalam kesempatan itu pula, bapak selalu menyampaikan harapan-harapannya kepada kami putra-putrinya jika kelak telah dewasa.

Di antaranya, yang masih tertanam dalam benak saya hingga saat ini, bapak sering mengatakan bahwa ia tidak akan mewariskan harta berupa uang kepada kami. Alasannya, kalau pun kami memiliki uang berlimpah dan disebut orang kaya, maka uang itu akan lenyap

seketika jika dirampok. Tetapi jika kami terdidik dan memiliki nama baik, maka itulah harta sejati yang tidak bisa diambil oleh siapa pun.

Pernyataan yang diungkapkan bapak itu, sangat mengena di hati kami. Itu sebab, kami semua anak-anaknya sangat 'ngotot' mengejar ilmu setinggi mungkin melalui pendidikan sekolah.

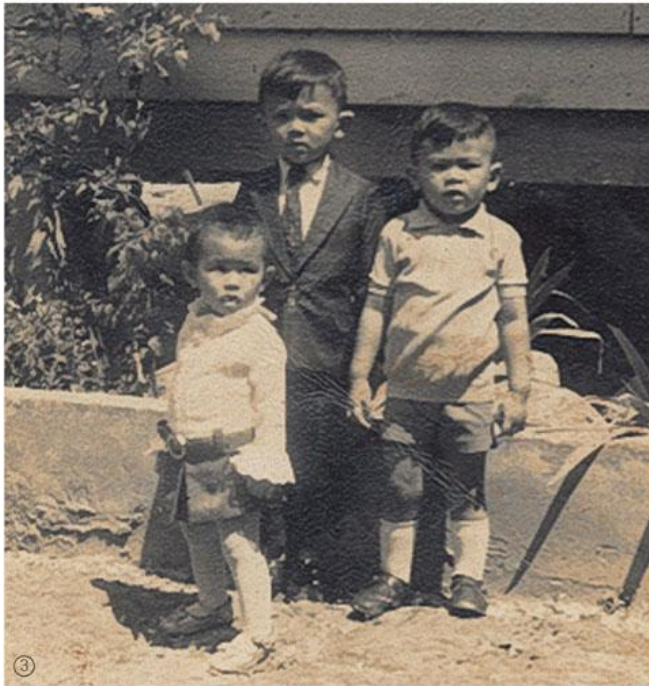
Semangat kami cukup tinggi, terlebih karena orang tua kami tidak hanya mendorong secara moral, tetapi juga bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membiayai kami bersekolah.

"Jika perlu, 'menjual kepala' pun saya lakukan untuk mendapat biaya sekolah kalian semua," begitu bapak selalu mengatakan kepada kami putera-puterinya.

Dukungan moral dan usaha sungguh-sungguh guna mendapatkan biaya pendidikan kami juga dilakukan oleh ibu Buniarti Ningsih. Beliau selalu menyisihkan uang untuk dibelikan emas 24 karat sebagai tabungan buat kelak biaya pendidikan kami anak-anaknya.

Langkah ibu ini, sempat





① BTP di usia bayi calon pemimpin masa depan.
 ② Bersama sang adik Harry Basuki, Profil kakak penuh tanggung jawab.
 ③ Bersama Basuri, adik (kini berbakat) bagi rakyat Belitung Timur sebagai dokter di rumah sakit setempat dan adik perempuan Fifi Lety.

mengundang tertawaan orang-orang yang mengetahui motivasi ibu saya menyimpan uang dengan cara membeli emas. Palsunya, saat itu kami puteranya masih kecil-kecil dan belum satu orangpun yang masuk sekolah. Tapi ibu yang memiliki pendirian teguh dan memiliki pandangan yang jauh ke depan, tak menghiraukan tertawaan orang-orang di sekitarnya. Yang penting baginya, kelak semua anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

dengan adik-adik saya.

Meski dari segi lokasi, saya berjauhan dengan orangtua, pendidikan keluarga tidak pernah berhenti dilakukan kedua orangtua. Salah satu misalnya, orangtua selalu mewajibkan kami anak-anaknya untuk 'pulang kampung' jika tiba saat liburan.

Untuk yang satu ini, kami anak-anaknya sempat melayangkan protes. Sebab, sebagai remaja, kami juga ingin seperti remaja kebanyakan yang lebih memilih berlibur ke tempat-tempat wisata

yang menyenangkan daripada 'pulang kampung'. Misalnya, Bali atau objek-objek wisata di luar negeri.

Tapi, bapak ternyata memiliki alasan yang kuat di balik 'kewajiban' yang beliau terapkan kepada kami. Bapak menyatakan, 'kewajiban' tersebut tak lain untuk menjaga agar hati kami tetap merakyat dan tetap merasa menjadi bagian anak-anak di kampung.

Jika bertahun-tahun menuntut pendidikan di luar kota tanpa pernah kembali ke kampung halaman, menurut bapak, hubungan emosional dengan kampung halaman akan lenyap. Ketidadaan hubungan emosional itu akan berdampak pada hilangnya empati dengan penderitaan anak-anak sebaya yang tidak memiliki kesempatan bersekolah seperti kami.

Karenanya, bapak memberi ultimatum jika tidak mau berlibur di kampung, maka sebaiknya kami tidak perlu meneruskan pendidikan di Jakarta. Bapak beralasan, percuma bisa menjadi sarjana tetapi berkarakter 'tidak peduli' dengan penderitaan rakyat banyak. Beliau juga menegaskan bahwa kami dikirim ke Jakarta untuk belajar. Bukan pindah ke Jakarta. Apalagi melupakan kampung halaman dan penduduknya.

TANAMKAN KEPEDULIAN KEPADA RAKYAT

Harapan dan kerja keras kedua orangtua agar kami bisa bersekolah setinggi mungkin, setahap demi setahap terealisasi. Apalagi, kami sendiri anak-anaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kedua orangtua. Selepas menamatkan pendidikan menengah pertama di kampung halaman, saya kemudian disekolahkan ke Jakarta. Begitu juga

Kalau mau berburu harimau maka harus mengajak saudara kandung



MENOLAK JADI 'DOKTER KOBOI'

Sejak kecil kami telah diarahkan untuk menempuh pendidikan sesuai harapan bapak. Tapi, tentu yang didasari oleh bakat dan kemampuan kami. Saya sendiri sesungguhnya diharapkan menjadi seorang dokter. Sangat mendesaknya kebutuhan tenaga medis di kampung halaman kami saat itu, menjadi salah satu alasan bapak mengarahkan saya untuk menjadi dokter.

Minimnya tenaga medis di kampung kami, kala itu memang cukup memprihatinkan. Apalagi setelah fasilitas

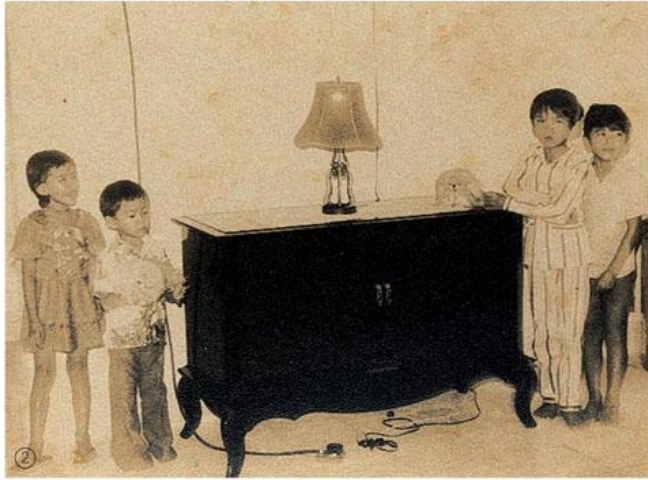
rumah sakit PT Timah ditutup. Praktis paska itu, warga di kecamatan kami sangat kesulitan mengakses fasilitas maupun tenaga kesehatan.

Saya sendiri sempat mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI). Tapi karena saya sendiri merasa tidak cocok menjadi dokter, di sana saya hanya sempat menjalani perkuliahan selama 1 minggu. Setelah itu, saya pindah kuliah ke Fakultas Teknologi Mineral Jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Keputusan saya ini disambut dengan kekecewaan oleh bapak. Beliau langsung

menulis surat bernada sedih dengan menandakan bahwa kondisi kesehatan rakyat akan semakin sulit karena ketiadaan dokter. Saya membela diri dengan mengatakan bahwa jika saya menjadi seorang dokter, maka pasien akan lebih cepat meninggal karena dokternya "kobo!". Karena itu, saya lebih memilih menjadi seorang insiyur yang dapat bekerja di dunia pertambangan. Akhirnya, dengan bijaksana bapak merestui dan bersyukur atas keputusan saya.

Pada tahun 1991 bapak jatuh sakit. Kemudian saya diminta menggantikan posisinya untuk mengatur usaha tambang



① Bersama keluarga berlibur ke Bogor berkunjung ke Kebun Raya.
 ② Sekeluarga berfoto dengan pesawat televisi pertama di kampung.
 ③ Memasuki masa remaja.
 ④ Dibiasakan menggunakan piama oleh sang ibu setiap malam hari menjelang tidur.



timah. Lalu adik kedua saya memutuskan memenuhi harapan bapak dengan menjadi seorang dokter.

Sekarang, adik saya sedang menjalankan tugas medis di kampung halaman kami dengan status dokter spesialis dan pegawai negeri sipil Kabupaten Belitung Timur. Pesan terakhir bapak menggugah kesadaran adik saya untuk mengabdikan kepada kampung halaman. Di saat sakit bapak semakin kritis, beliau sempat berkata: "Saya tidak lama lagi akan meninggalkan kalian. Percuma saya memaksamu pulang kampung sebagai dokter. Toh, saya tidak



punya kesempatan melihat itu. Tetapi perlu kamu ketahui betapa banyak rakyat akan mati karena diharuskan menempuh jalan yang buruk hanya untuk berobat ke ibukota.

Waktu itu, kondisi jalan di daerah kami masih begitu buruk dan dokter hanya tersedia di kabupaten dan kecamatan lain.

Kemudian, bapak melanjutkan pesannya: "Satu hal yang mesti kamu ingat sepanjang hayat jika kamu tidak pulang... saya menyesal telah menyekolahkan kamu menjadi seorang dokter". Mendengar kata-kata yang dilontarkan bapak tersebut, kami semua menitikkan air mata. Akhirnya, adik saya memenuhi harapan bapak untuk mengabdikan kepada kampung halaman sebagai seorang dokter. Keputusan itu didukung oleh calon istrinya yang juga seorang dokter. Mereka kemudian menikah dan menetap di kampung kami.

FILOSOFI BERBURU HARIMAU

Kalau hendak berburu harimau maka harus mengajak saudara kandung. Filsafat Tiongkok kuno ini sering dilontarkan bapak kepada kami putera-puterinya. Terutama setelah bapak menerima

Orang miskin jangan
melawan orang kaya.
Orang kaya jangan
melawan penguasa

warga yang memang kerap datang untuk melaporkan persoalan yang mereka hadapi.

Di kampung halaman kami, bapak memang dianggap sebagai tokoh. Sehingga tak jarang warga yang menghadapi suatu masalah datang menemui bapak untuk ikut menyelesaikannya.

Jika bapak kedatangan tamu, umumnya, anak-anak akan diminta meninggalkan ruangan. Apalagi jika kedatangan itu hendak membicarakan masalah masyarakat.

Sebagai anak-anak, tentu saja kami pun diharuskan masuk ke dalam ruang

keluarga dan tidak boleh mendengarkan pembicaraan bapak dengan tamu-tamunya. Apalagi jika pembahasannya seputar masalah kehamilan di luar nikah. Tetapi bapak menerapkan beberapa pengecualian. Kami masih diizinkan mendengarkan seluruh pembicaraan dari balik ruangan dengan syarat tidak boleh berkomentar.

Setelah itu, masalah yang telah kami dengar akan dibahas kembali di meja makan. Di saat pembahasan di meja makan itulah, bapak kerap mengungkapkan filsafat Tiongkok kuno kalau mau berburu harimau harus mengajak saudara kandung.

Awalnya, kami sempat kebingungan dan bertanya apa makna di balik filsafat itu. Tapi, bapak tak membiarkan kami dalam kebingungan. Bapak menjelaskan bahwa ketika kita dikelilingi oleh kawan-kawan harimau yang siap menerkam, maka kemungkinan terbesar adalah kawan seperburuan kita akan menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Sekalipun hal itu berarti meninggalkan kita bersama dengan kawan-kawan harimau ganas. Tetapi berbeda jika saudara sekandung yang menjadi kawan seperburuan kita. Sekalipun jumlah harimau ganas begitu banyak dan siap menerkam, tetap saja dia tidak akan lari karena lari berarti kehilangan saudara sekandung.

Analogi tersebut berlaku ketika berhadapan dengan masalah hukum formal di tengah karut-marutnya pemerintahan yang korup. Untuk menghadapi kejahatan politik itu, dibutuhkan saudara sekandung dengan kapasitas sebagai pengacara. Contohnya jika mengalami permasalahan hukum, kita tidak akan dihianati oleh pengacara bayaran. Cerita ini menginspirasi adik perempuan saya sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengambil bidang hukum dan berhasil lulus dari Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di





① Berboncong dengan adik Fifilet yang sempat mencalonkan diri menjadi walikota Pangkal Pinang 2008-2013.
 ② Kemah bersama saat acara perpisahan masa SMA di PSKO III Jakarta.
 ③ Saat mapam Fakultas Teknologi Mineral Usakti 1984.

Melbourne University.

Keputusan adik saya ini mendapat dukungan penuh dari orangtua. Apalagi, sebelumnya dalam setiap kesempatan pembahasan suatu masalah di meja makan, bapak mengetahui adik perempuan saya memiliki potensi menjadi seorang pengacara. Karena ia sepertinya yang paling cerdas untuk memahami berbagai sengketa dan persoalan-persoalan yang kompleks.

Kini, adik perempuan saya itu berpraktek sebagai pengacara. Pada saat tulisan ini dibuat, dia telah memutuskan akan mencalonkan diri menjadi Walikota Pangkal Pinang untuk periode 2008-2013. Keputusan ini diambil setelah kasus pembongkaran pasar tradisional oleh walikota secara sewenang-wenang. Kebetulan adik saya ditunjuk sebagai penasihat hukum korban pengusuran oleh komunitas pedagang pasar

tradisional. Fenomena pengusuran paksa itu mengingatkan kami akan ungkapan Tiongkok kuno yang juga sering dikutip oleh bapak saya: "Orang miskin jangan melawan orang kaya. Orang kaya jangan menentang pejabat". Jadi untuk menantang walikota "terpaksa" harus menjadi walikota agar mampu membela hak pedagang pasar tradisional.

Bapak saya juga memiliki perhatian di bidang pengembangan pariwisata. Karena itulah, beliau mendorong adik ketiga saya, Harry Basuki, agar mau mengembangkan bisnis pariwisata eks penambangan timah berupa danau-danau tambang. Untuk itu, adik saya bersekolah sampai ke Swiss. Harry Basuki adalah lulusan sekolah hotel HIM dari sekolah perhotelan di Swisszerland. Sebelum bapak meninggal, beliau juga berpesan agar adik ketiga saya dapat menamatkan jenjang pendidikan S2. Adik melakoni itu dengan bersekolah ke Australia dan lulusan master dari sekolah wisata Lismore, Sidney di Australia mengenai wisata bahari. Kini ia bekerja sebagai praktisi/konsultan di bidang pariwisata dan perhotelan yang membuka usaha di Jakarta dan Bali.

LAWAN PEJABAT PENYENGSA RAKYAT

Sebagai anak pengusaha yang "vokal" terhadap permainan manipulasi proyek-proyek pemerintah maupun PT Timah yang dilakukan oleh para oknum pejabat dan pengusaha/kontraktor, tentu saja kami sering sekali "dikerjai" hingga mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan roda usaha. Bapak saya hanya berusaha di bidang penambangan timah, menjadi kontraktor tambang timah dari PT Timah. Kami mengerti betul apa artinya kelimpahan dan kekurangan. Kami dididik untuk menegakkan kebenaran walaupun harus sendiri.

Saya mulai mengerti isi hati bapak ketika saya berlibur di kampung halaman. Saat itu, bapak dan ibu terlibat pertengkaran hebat disebabkan oleh masalah keuangan. Ketegangan itu dipicu oleh usaha bapak yang semakin merugi sehingga untuk mengatasinya mesti meminjam uang dari ibu yang



Foto berusia 5-1 Fakultas Teknologi Mineral (Jurusan geologi) Universitas Trisakti 1990. Bersama almarhum bapak Indra Tjahaja Purnama (Cung Kim Nam), Ibu Buniarti Ningsih (Bun Nen Caw) beserta saudara.

memiliki usaha apotik. Tentu saja, apotik terbebani dan modal terkuras karena harus membayar pembelian obat dari perusahaan besar farmasi. Kemudian ada sekelompok masyarakat dibelit kesulitan keuangan untuk pembiayaan sekolah anak dan terpaksa meminta bantuan kepada bapak. Karena bapak juga mengalami kesulitan uang, maka ia terpaksa meminjam dana dari ibu. Tentu saja, ibu langsung menolak dan marah karena bapak dinilai tidak peduli dengan kelangsungan usaha apotik yang menjadi penopang hidup kami sehari-hari.

Saya mencoba membantu bapak untuk mendapatkan pinjaman uang kepada ibu. Saya mengatakan tidak mungkin bapak tidak peduli dengan usaha ibu. Apalagi sampai membiarkan ibu bangkrut. Saat itulah ibu berkata dengan suara keras: "Kamu mati pun bapakmu tidak akan perduli, apalagi cuma apotik saya ditutup". Saya kaget dan tidak mengerti apa maksud kalimat sekeras itu. Kemudian ibu mulai bercerita tentang pengalaman yang terjadi di tahun 1967, masa-masa ketika beras sulit diperoleh sekalipun memiliki uang. Ketika itu usia saya belum genap 1 tahun. Bapak baru saja mendapat 2 kaleng besar beras (seukuran kaleng minyak tanah). Karena mengetahui karakter bapak yang suka membagi beras kepada orang yang kehabisan beras, ibu memutuskan untuk menyembunyikan ke 2 kaleng beras tersebut.

Tidak lama setelah bapak memperoleh 2 kaleng beras itu, datanglah seseorang meminta beras karena simpanan berasnya habis sehingga anaknya terancam bahaya kelaparan. Bapak kemudian teringat akan 2 kaleng beras yang baru saja ia beli. Bapak mengambil 1 kaleng untuk diberikan kepada orang tersebut. Ketika ibu mengetahui hal ini, ibu memohon agar bapak mengurungkan niat tersebut sebab bisa berakibat fatal untuk saya. Ibu yang saat itu berusia 20 tahun dan baru memiliki bayi pertama yang belum genap berusia 1 tahun tentu sangat mengkuatirkan putera pertamanya. Tetapi bapak tetap bersikeras dengan penjelasan bahwa ia akan mencari ganti beras yang diberikan tersebut. Bapak tidak terlalu khawatir karena masih ada persediaan 1 kaleng lagi. Sedangkan jika tidak memberi bantuan kepada yang membutuhkan maka sudah pasti orang itu akan kekurangan makan dan mati.

Setelah mendengar penjelasan bapak ini, saya bertanya tentang konsep berpikirnya. Beliau menjawab: "Jika kamu hendak menolong orang lain, jangan pernah berpikir untuk menunggu sampai kamu berkelimpahan harta terlebih dahulu. Karena semakin kekayaanmu bertambah maka hatimu akan selalu melekat pada harta itu. Akibatnya, kamu akan merasa selalu kekurangan. Tapi jika kamu tetap membantu orang yang kesulitan sekalipun kamu berada

dalam posisi tidak terlalu baik tapi cukup memiliki apa yang diperlukan orang tersebut maka semakin kamu berkelimpahan, kamu akan semakin senang membantu orang lain. Uang itu penting tetapi jangan kita dikendalikan uang. Biarlah uang itu menjadi budak kita".

Bapak tidak mewarisi uang ketika beliau meninggal, tetapi beliau mewariskan "mesin pencetak uang" yaitu putra-putrinya. Kami dididik untuk meneruskan cita-cita bapak yang belum terwujud ketika beliau masih muda. Salah satunya adalah menjadi pejabat agar bisa melawan oknum pejabat penyengsar rakyat. Saya juga selalu ingat salah satu pesan yang pernah beliau sampaikan di tahun 1995 ketika saya mengalami kefrustasian terhadap perilaku oknum pejabat. Karena frustrasi, saya sempat berpikir untuk pindah kerja ke luar negeri. Namun beliau berkata: "Kamu tidak boleh pergi ke luar negeri, karena rakyat miskin membutuhkan kamu". Lalu saya berkata: "Mana mungkin, muka "minyak babi seperti kita bisa menjadi pejabat". Bapak menjawab: "Percayalah, satu hari kelak rakyat akan langsung memilihmu untuk memperjuangkan nasib mereka". Kata-kata beliau terbukti di tahun 2005 ketika saya terpilih secara Bersih, Transparan dan Profesional menjadi Bupati Belitung Timur.

02

DARI KETUA MAJELIS KE KETUA PARTAI

Tabu!" Sepenggal kata itu sontak muncul dari mulut seorang pendeta begitu saya menyatakan keinginan menanggalkan tugas sebagai ketua majelis di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Rayon II Pluit dan memulai karier di dunia politik.

Tidak hanya itu, cukup banyak teman-teman di gereja yang juga menilai langkah saya sebagai seorang ambisius dengan kekuasaan. Sebab, menurut mereka, bagaimana bisa seorang yang ketua majelis bisa minta berhenti untuk kemudian menjadi ketua partai. Di kalangan Tionghoa Kristen, menjadi politikus merupakan hal yang "tabu" dan dinilai tidak rohani sejak zaman Belanda?

Keputusan saya masuk ke ranah politik juga mendapat reaksi dari Bangka Belitung. Bahkan ada yang tergelong menggelikan. Betapa tidak, di Kabupaten Belitung Timur ada oknum-oknum elite politik yang menyebarkan isu rasialis ke rakyat, bahwa saya sedang membawa misi Kristenisasi sebagai misionari yang

dibiayai oleh Vatikan.

Penyebarkan isu itu sejatinya adalah "orang goblok". Mereka belum bisa membedakan agama Kristen dan Katholik. Saya sebagai Kristen justru dibidang didukung Gereja Vatikan yang Katolik. Sama sekali tidak *nyambung*. Jika tidak mau disebut sebagai "orang goblok", penyalur isu itu sudah barang tentu begitu bersifat rasialis, sehingga menjadi mata gelap.

PANGGILAN HATI NURANI

Inilah sulitnya menurut "panggilan nurani" di tengah-tengah krisis identitas kebangsaan. Di satu pihak, mengakui Bhinneka Tunggal Ika, dan sila Ketuhanan yang maha Esa. Tapi di sisi lain, diperdebatkan lagi oleh oknum elite politik bahwa yang kafir mengakui Esa yang salah (Esanya = 3), sehingga tidak layak menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia yang mengakui 5 agama resmi





① Profil seorang kepala daerah berdedikasi sekaligus seorang ayah teladan bagi keluarga (searah jarum jam) Daud Albenner, Veronica, BTP, Nathania Bernice, Nicholas Sean.
 ② Sebagai seorang bupati saat merayakan hari kemerdekaannya Agustus 2006.
 ③ Dengan tatapan penuh tekat sebelum terpilih menjadi bupati.

dan kepercayaan yang dianut rakyatnya. Padahal, begitu jelas di dunia dan akherat hanya ada 1 Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa.

Bahkan ada yang bertanya bagaimana kamu tahu ini merupakan suatu "panggilan". Bagi saya sederhana saja. Jika menurut keinginan saya secara pikiran dan "kedagingan", tentu saja saya ingin menjabat sebagai ketua majelis gereja, sekaligus menikmati "status sosial" sebagai tokoh agama di komunitas Kristen Jakarta. Sebaliknya, jika menurut

suara nurani/"Roh", jelas ada suara yang menghakimi; "Siapa yang bisa menolong rakyat banyak agar bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal"?

Selain itu, secara kepentingan keluarga maupun kesukaan pribadi, bagaimana bisa saya membawa pulang seluruh keluarga untuk pindah ke kampung, sekalipun tempat kelahiran sendiri, tapi tidak memiliki jaringan telepon, apalagi telepon bergerak (*handphone*). Juga tidak memiliki mall, tidak bisa membeli roti gandum dan tidak memiliki bioskop?

Rakyat tidak hanya membutuhkan doa-doa di gereja. Yang dibutuhkan mereka adalah pertolongan nyata agar mereka memiliki jaminan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan jaminan hari tua di dunia ini.

① ② ③ Saat menjabat bupati di dalam rumah dinas bersama petugas rumah tangga.



LAWAN PEJABAT KORUP, JADILAH PEJABAT

Bagaimana mungkin kita bisa melawan penguasa jika mereka tidak melakukan semua tugas sumpah jabatannya itu? Tentu saja sebagai rakyat miskin tidak mungkin bisa melawan orang kaya. Apalagi oknum pejabat yang korup. "Orang kaya saja tidak bisa menantang pejabat. Jadi kalau mau lawan oknum pejabat yang korup jadilah pejabat," demikian yang saya dengar dari bapak saya yang mengutip kalimat Tiongkok kuno.

Di tengah pergolakan batin untuk memilih ke politik atau menjadi ketua majelis di gereja, dengan melihat kenyataan kesalahpahaman dari pihak di gereja dan rasialismenya para oknum elite politik yang korup dan pengecut tetapi terus mengobarkan kebencian kepada saya yang Kristen, saya katakan bukankah

semua manusia bisa beriman kepada Allah karena mendapatkan Hidayah/Anugerah Allah. Jadi ketika saya tidak mendapat hidayah sesuai agama mayoritas, kenapa saya dibenci dan tidak berhak menduduki jabatan pejabat publik di negara ini.

Secara UUD 45 maupun Pancasila jelas melanggar hak saya sebagai warga negara.

Secara iman/rohani juga telah menghina Allah. Bukankah Hidayah adalah hak Allah. Jadi jika saya dibenci karena tidak mendapat Hidayah, itu artinya yang patut dibenci dan salah adalah Allah itu?

Sekarang siapa yang lebih kafir? Yang belum mendapat Hidayah Allah atau yang mendapat Hidayah Allah tetapi benci

..bukan sebaliknya mengatas namakan Tuhan tetapi menikmati hidup berlimpah di atas penderitaan rakyat miskin..





kepada orang yang belum mendapat Hidayah Allah? Saya tidak mendapat Hidayah Allah, tetapi saya mendapat anugerah Allah menjadi seorang beriman Kristen. Jadi sangat jelas bahwa saya bukanlah seorang yang kafir.

Sementara beberapa oknum di

gereja, menganggap yang saya putuskan bukanlah kehendak Tuhan, tetapi kehendak pribadi saya yang ambisius untuk masuk ke politik. Untuk itu jelas saya harus mengecek/mendengarkan suara nurani saya yang paling dalam, apa benar?

Lalu, saya berkata dalam hati bagaimana jika saya memilih menjadi seorang pendeta dari pada seorang politikus? Jelas ini kehendak Tuhan katanya. Justru saya tidak berani lakukan, karena jelas saya sedang menipu/melawan Tuhan. Sebab, dalam nurani saya sudah menghitung alangkah kayanya saya jika jadi seorang pendeta.

Bayangkan, dengan 1000 jemaat yang memberi Rp1 juta per tahun saja, saya sudah bisa memperoleh Rp1 milyar per tahun. Tentu saja bukan berarti tidak boleh menjadi pendeta dan menerima berkat dari jemaat. Masalahnya, saya



diberi pilihan menolong rakyat banyak dengan kecaman dan ancaman bersifat rasialisme dan untuk kepentingan diri sendiri, sekaligus mendapat pujian dari kalangan sendiri tanpa menolong rakyat banyak.

Tentu saja saya tahu untuk kepentingan orang banyak dengan pengorbananlah yang Tuhan kehendaki di dalam iman saya. Bukan sebaliknya mengatas namakan Tuhan, tetapi menikmati hidup berlimpah di atas penderitaan rakyat miskin yang tidak berpengharapan.

Setelah meyakinkan "panggilan" ini, saya putuskan untuk keluar dari majelis gereja pada tahun 2003. Lalu, saya langsung pulang kampung dengan menjabat Ketua cabang DPC partai PIB yang sibuk mengurus verifikasi agar bisa ikut Pemilu 2004.

① ② saat meninggalkan jabatan sebagai bupati dan berikhtisamnya menjadi gubernur Bangka-Belitung.
③ Inspektur upacara hari Pramuka 2006.

03

PROPHETICAL VOICE VS POLITICAL VOICE

Apa yang harus saya lakukan dalam menjalankan fungsi sebagai ketua partai di kabupaten Belitung Timur yang baru? Pertanyaan itu mengemuka dalam benak saya, kala terpilih sebagai ketua DPC partai PIB. Apakah saya akan menjalankan “pelajaran” ilmu politik Machiavellian yang sering saya dengar dan dipraktikkan oleh oknum

elite politik?

Jika dalam prinsip agama terdapat aturan haram dan halal, namun praktek politik yang selama ini dijalankan hanya mengenal prinsip “menang dan kalah”. Jadi haram atau halal kita hantam saja, yang

penting merebut kekuasaan sekaligus kekayaan tidak peduli halal atau haram. Bagi mereka, politik hanyalah “*a game to gain power*”.

Tentu saja paradigma politik semacam itu tidak sesuai dengan “panggilan nurani” saya ketika memutuskan masuk ke ranah perpolitikan. Juga, sama sekali tidak cocok



dengan tugas yang diembankan di atas pundak saya sebagai ketua partai. Sebagai ketua partai, saya memikul tanggung jawab mendidik rakyat agar mampu memanfaatkan pesta demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau *bonum commune*.

OKNUM KORUPTIF DI TENGAH RAKYAT

Lalu apakah saya harus melawan arus? Jika saya melawan arus, bukankah amat sulit bagi saya untuk menang dalam pemilu? Apa yang dihadapi dalam proses verifikasi partai untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu?

Selama ini ada asumsi yang menyakini bahwa terdapat banyak oknum di partai politik maupun elite yang korup. Tapi dalam kenyataannya tidak hanya di partai politik. Di tengah-tengah rakyat juga terdapat oknum yang korup.

Seperti pengalaman saya ketika berhubungan dengan perilaku “rakyat”. Perlu saya garis bawah bahwa tidak semua

seperti yang akan saya gambarkan berikut. Namun, paling tidak, inilah gambaran adanya oknum korup di tengah massa rakyat yang mengharapkan perbaikan kehidupan.

Misalnya, ketika akan memasuki masa proses verifikasi, sudah ada oknum pengurus partai yang menuntut diberikan perahu motor. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, dia mengancam bahwa seluruh anggota partai di daerah kekuasaannya akan mengundurkan diri dari partai. Dengan demikian, partai saya akan gagal dalam menghadapi verifikasi KPU.

Tapi, saya bukan sosok pengecut yang mudah takluk dengan ancaman. Karena

tuntutan mereka itu sudah merupakan bagian dari penyakit korup, saya yang masuk ke dunia politik dengan motivasi antara lain memberantas korupsi, jelas menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Meski konsekwensinya, mereka benar-benar meninggalkan partai dan verifikasi partai di tahap I berujung kegagalan.

Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kami melakukan perbaikan daftar anggota, Partai PIB kemudian dinyatakan lolos verifikasi, sehingga bisa ikut dalam Pilkada Legislatif.

Saat menghadapi kampanye dan

memberi daya tarik atas partai yang baru, kami melakukan banyak sekali kegiatan sosial. Mulai dari membuat podium mini lapangan sepak bola, membuat lapangan bola volley dan sepak bola, memperbaiki infrastruktur jalan, membuat sumur, membuat tambak ikan, sampai menyediakan makan di restoran dan segala macam baju kaos serta atribut partai.

Tentu saja banyak sekali anggota yang berhasil dijarah. Persoalan mulai muncul, ketika model baju kaos yang kami cetak bervariasi. Imbasnya, banyak oknum pengurus partai yang ingin memiliki semua model kaos itu, tentu



① Kampanye Pilgub 2007 Bangka Belitung di Sungai Liat Bangka bersama istri.
② Kampanye Pilgub 2007 Bangka Belitung di Pangkal Pinang bersama istri.

saja tidak kami berikan. Persoalan baju ini pun kemudian ternyata bisa menjadi pemicu mereka yang tidak mendapatkan semua model kaos menyatakan keluar dari partai. Ironis! Namun, itu tak mematahkan semangat kami para pengurus dan anggota yang tetap setia. Sewaktu kampanye pemilu, saya

harus memilih melakukan pendidikan politik atau melakukan azas saling membutuhkan dengan rakyat memilih. Dengan segala yang telah kami berikan, dan jika diteruskan dengan melakukan "bantuan uang", tentulah kami akan menuai banyak suara. Tetapi saya berkeyakinan, jika saya

Menjalankan fungsi
'kenabian' menyuarakan
kebenaran dan keadilan
sekalipun dengan resiko ditolak



menjadi anggota DPRD terpilih dan "konstituen" yang memilih disebabkan karena memperoleh sesuatu, pastilah kelak "konstituen" itu akan terus meminta. Atau mereka akan mengatakan bahwa mereka akan dilupakan pasca pemilu. Bahkan, lebih buruk lagi mereka bisa merasa tidak ada harapan, memilih siapa pun sama saja. Setelah melihat fenomena tersebut, saya mengambil satu keputusan yaitu dalam berpolitik harus berdasarkan *prophetical voice*, bukan *political voice*. Artinya, melakukan fungsi "kenabian" yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, sekalipun dengan resiko ditolak dan dicampakkan. Sedangkan *political voice* artinya tidak peduli halal atau haram, yang penting menang dalam pemilu, karena hanya ada prinsip "menang dan kalah". Tidak ada istilah "halal dan haram".



- ① Salah satu foto saat kampanye menyuarakan kebenaran.
- ② Bersama adik istri di ruang kerja bupati Belitang Timur.
- ③ Bersama dengan mahasiswa hasil program beasiswa saat menjabat bupati.
- ④ Memberikan hadiah kepada anak-anak kurang mampu di Belitang Timur.
- ⑤ Berjoget bersama muspida dan tokoh masyarakat di HUT RI 2006.

MODUS KORUPSI OKNUM RAKYAT

Terdapat berbagai bentuk tawaran dari oknum rakyat maupun oknum tim sukses, ketika kampanye pemilu 2004 maupun pilkada 2005 dan 2007. Saya diharuskan mengambil langkah untuk merespon perilaku tersebut dengan tetap berdasarkan "prophetical voices".

Berikut ini contoh-contoh perilaku politik oknum rakyat dan respon saya:

1 Permintaan uang sebesar Rp20 ribu per orang sebagai syarat agar partai saya dipilih, merupakan fenomena yang sangat umum saya temui. Permintaan ini dengan tegas saya tolak. Hasilnya, partai kami kalah di dusun tersebut.

2 Permohonan sumbangan rumah ibadah yang diajukan ke banyak partai. Istilah yang mereka pakai adalah "apa yang akan diberikan oleh partai saudara yang merah putih". "Atap seng ini dari yang

warna hijau, semen sudah dari yang kuning? Kami akan bagi suara kami ke partai yang telah menyumbang". Saya katakan : "kalau begitu bapak salah mengundang saya, *toh* masih ada belasan partai peserta lainnya, minta saja kesana. Tetapi jika setelah pemilu usai, rumah ibadah ini masih belum terselesaikan, maka bapak boleh cari saya. Masalah akan diberikan atau tidak, itu urusan saya dengan Tuhan". Hasilnya? Jelas di tempat ini saya kalah telak.

3 Ada yang tinggal di pulau kecil, menawarkan suara seisi pulau dengan syarat saya menyumbangkan tangki air terlebih dahulu. Karena sudah terlalu sering dibohongi oleh peserta pemilu jadi mereka meminta imbalan terlebih dahulu. Jika ternyata tidak menang, mereka bersedia mengembalikannya dengan menawarkan surat jaminan di atas meterai oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat. Tentu saja hal ini ditolak, saya hanya katakan





- ① Saat kampanye pilgub, dekat dengan sosok kebapakan.
- ② Dengan rekan bisnis perusahaan pribadi BTP di daerah Dumai.
- ③ Foto bersama pilot TNI AU, Darlanud, dan Sekda Beltung Timur sebelum peninjauan udara.
- ④ Menghadiri hari korupsi sedunia di tugu proklamasi bersama ketua KPK dan MenPan.
- ⑤ Menerima piagam anti korupsi (penyelenggara negara) bersama ibu Nurilala (rakyat Madani) diberikan oleh Bp. Sofyan Djaili

pengurus partai, apalagi setelah kami sediakan seragam sepak bola yang bagus lengkap dengan bolanya. Secara teori kami akan kuasai mayoritas di dusun ini. Ternyata kami kalah telak. Kenapa?

Sederhana saja, kekalahan ini disebabkan pada saat kampanye yang mengambil tempat di tengah lapangan sepak bola yang penuh sesak, saya mengatakan "goblok" sebagai balasan teriakan massa "hidup-hidup" dan "merdeka". Saya katakan kepada para peserta kampanye bahwa mereka mendukung partai saya tanpa peduli bahkan mengetahui apa ideologi partai saya, yang penting karena sudah mendapatkan banyak bantuan.

Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru mendapatkan Rp250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan "dirampok" oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja.

Penjelasan saya ini membuat mereka marah, tetapi semua baju kaos tetap diambil. Saya katakan, pilihlah partai yang pengurusnya tidak boleh merangkap menjadi anggota DPRD, supaya bisa diberhentikan dengan mudah nantinya. Di samping itu, pilihlah partai yang memberikan kursi DPRD kepada yang paling dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan nomor urut calon legislatif (umumnya yang nomor urut awal pasti diisi oleh pengurus atau yang paling dekat dengan pengurus yang berwenang menentukan nomor urut tersebut).

jika kalian memang mau memilih pejabat yang benar, setelah terpilih pastilah tangki air akan diberikan. Karena sudah menjadi kewajiban pejabat memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggunakan dana APBD. Jadi bukan semata-mata balas budi karena jasa suara pemilih. Saya bersikap kalau percaya kepada saya silahkan pilih. Jika tidak maka silahkan pilih saja yang mau membuat konsesi semacam itu. Tetapi karena tidak ada calon lain yang memenuhi tuntutan tersebut, sebagian besar dari mereka tetap memilih saya.

4 Ada lagi dusun yang sudah memasang semua bendera partai saya. Bahkan banyak di antara penduduknya telah menjadi pengurus. Lalu pada suatu hari,

kepala adat dusun tersebut datang meminta uang Rp4.000.000,-. Jika tidak dipenuhi, maka terpaksa dia akan menerima pemberian uang dari partai lain, dan sekaligus mohon ijin untuk mengganti bendera partai saya dengan bendera partai lain yang memberi uang. Ketika saya tolak, bendera partai saya semerta-merta menghilang dari dusun itu dan diganti dengan bendera partai yang "berwarna mencolok". Partai kami juga kalah total di daerah ini.

5 Sekarang kita lihat bagaimana reaksi dusun yang kami buat stadion mini lapangan sepak bola, lapangan bola volley, sumur air, tambak ikan dan lain-lain. Apakah mereka kemudian memilih kami? Yang jelas hampir semua menjadi



PENDIDIKAN PROPHETICAL VOICES

Setelah kekalahan telak di pemilu 2004, saya tidak berhasil memberi kemenangan besar bagi partai. Tetapi berhasil mendidik rakyat untuk percaya bahwa masih ada yang memperjuangkan nasib



mereka.

Ketika mencalonkan diri menjadi bupati, biaya yang dikeluarkan untuk saksi, buku visi-misi, atribut dan makan-minum di rumah, dengan tanpa kegiatan kampanye keluar, saya hanya menghabiskan uang Rp500 juta. Kampanye bupati ini juga dilakukan tanpa sepotongpun baju kaos. Hasilnya? Dusun yang pernah menolak karena dikatakan "goblok" berbalik menjadi 80% memilih saya. Inilah hasil "pendidikan *prophetical voices*". Lalu ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, kepercayaan dari dusun-dusun lain semakin meningkat. Yang tadinya hanya memilih 1% di pemilu, di Bupati meningkat menjadi 37,13%, saat pilkada gubernur telah meningkat menjadi rata-rata 60%-85%, tergantung banyaknya hak pilih yang dengan "sengaja" dihilangkan oleh oknum yang berwenang. Dengan pengalaman di atas, terbukti rakyat mendambakan pemimpin yang bisa mensejahterakan mereka dan tidak munafik. Rakyat sudah terlalu lelah "dibohongi". Ini yang membuat mereka merasa siapapun yang jadi pasti melupakan mereka, dan tidak banyak berarti untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, saya yakin, begitu kita bisa membuktikan kita berbeda, pasti masih banyak rakyat yang akan memilih kita. Walaupun saya berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan yang berbeda dengan mayoritas rakyat pemilih.

① Foto dengan tim dosen Universitas Trisakti, tandatangan MOU untuk beasiswa 4 anak dari Beltung Timur.
② Membuka pertandingan motorcross di Beltung Timur 2006.





04 PILIH BTP, BUKAN SARA



Latar belakang bangkitnya semangat ini, jelas tidak terlepas dari kekejaman kolonialisme Belanda yang beratus-ratus tahun membelenggu tanah air. Penjajahan yang mengakibatkan masyarakat Indonesia (kala itu masih bernama Hindia Belanda) tidak bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang layak. Justru sebaliknya disiksa hingga banyak yang mati sia-sia.

Sepuluh tahun lalu, sejumlah tokoh yang didukung oleh mahasiswa berjuang melakukan reformasi. Keterbelengguan akibat kungkungan Orde Baru yang memerintah secara otoriter, korupsi yang merajalela, dan kemiskinan yang meluas adalah beberapa alasan munculnya

gejolak tersebut. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Di masa itu pun tak sedikit yang menjadi korban.

Lantas apa makna dari 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi tersebut. Sudahkah cita-cita para pahlawan itu terealisasi, atau malah sebaliknya, memunculkan 'belanda-belanda baru' dan 'orde baru yang berkedok baru'?

Seratus tahun silam, sejumlah tokoh-tokoh, di antaranya Sutomo, Gunawan, dan Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryoningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Douwes Dekker memprakarsai lahirnya Boedi Oetomo yang sekaligus cikal bakal bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Prakarsa yang dilakukan putera bangsa ini menandai Kebangkitan Nasional yang setiap tahun kita rayakan.



- ① Kampanye cagub Bangka Belitung 2007.
- ② Mendapat pin penyelenggara negara anti korupsi di hari anti korupsi sedunia Desember 2006.
- ③ Di KPUD dengan cagub lain dalam pilgub Bangka Belitung saat menarik nomor urut peserta.

KEPALA LURUS, BAWAH LURUS

Kenyataan yang ada bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia semakin melorot ke bawah. Indonesia semakin tertinggal dari bangsa lain. Apa sesungguhnya yang salah?

Tentu saja banyak sekali bisa disebutkan sebagai alasannya. Salah satu yang bisa dijadikan kambing hitam adalah krisis multi dimensi. Namun, mencari kambing hitam tidak akan menyelesaikan persoalan.

Karenanya, ada baiknya salah satu pepatah Tiongkok kuno perlu dijadikan alat untuk menelaah persoalan tersebut. Pepatah yang sampai saat ini masih berlaku menyatakan, bahwa jika kepalanya lurus maka yang di bawahnya tidak berani tidak lurus. Artinya, rakyat sangat ditentukan oleh pemimpinnya.

Dengan dasar seperti itu, saya menarik kesimpulan bahwa kondisi bangsa ini

diakibatkan oleh kesalahan pemimpin yang memimpin. Meski pemimpin terpilih dengan sistim langsung oleh rakyat.

Salah satu penyebabnya adalah proses perekrutan pemimpin bangsa ini yang bermasalah. Kita lebih banyak

menghasilkan pemimpin yang se-suku, se-agama, dan se-ras. Bahkan, sebagai dampaknya, tidak sedikit yang terpilih sesungguhnya tidaklah pantas disebut pemimpin. Melainkan hanyalah penguasa dengan roh penjajah kolonialisme yang selalu melakukan politik *divide et impera* atau politik pemecah belah bangsa.

Pengalaman saya selama mengikuti kampanye Calon Anggota Legislatif Tingkat II pada pemilu 2004, Pilkada Langsung Bupati Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2005 dan Pilkada Langsung Gubernur Propinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007, bisa dijadikan sebagai contoh nyata tentang hal ini.

Rakyat miskin selalu merasa setelah pesta demokrasi usai, maka nasib mereka kembali akan dilupakan oleh yang sudah menjadi pejabat. Demikian juga kelompok rakyat yang berpendidikan dan berpenghasilan di atas rata-rata rakyat, menyatakan siapapun yang jadi nasib bangsa ini tidak akan berubah banyak. Sebab, yang jadi pejabat "itu-itu juga" atau satu sama lainnya sama/mirip sifat karakternya.

Bahwa jika kepalanya
lurus maka yang di
bawahnya tidak berani
tidak lurus



BERLINDUNG DI BALIK AYAT SUCI

Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan "roh kolonialisme".

Ayat itu sengaja disebar oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep "seiman" memilihnya.

Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya, melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.

Padahal, setelah saya tanyakan ke teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi Besar Muhammad SAW dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan kelompok Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI kepala pemerintahan bukanlah kepala agama/imam kepala.

Bagaimana dengan oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen. Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.

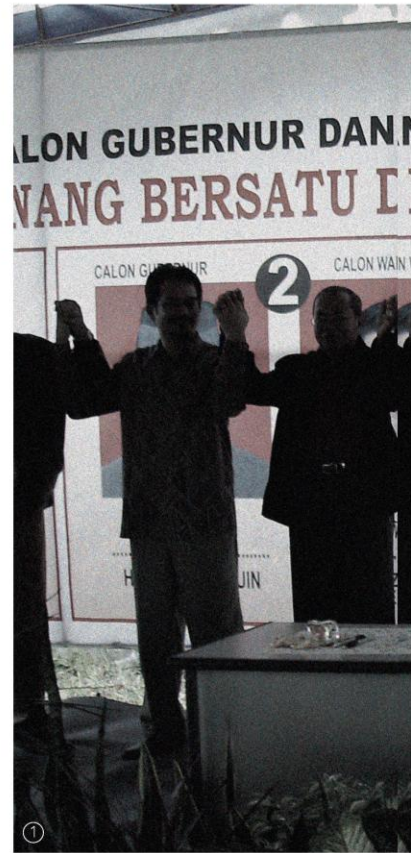
Saya tidak tahu apa yang digunakan oleh oknum elite di Bali yang beragama Hindu, atau yang beragama Buddha. Tetapi saya berkeyakinan, intinya pasti,

jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang rasnya lain. Intinya, pilihlah yang seiman/sesama kita (suku, agama, ras, dan antar golongan). Mungkin, ada yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita manusia, yang lain bukan, karena dianggap kafir, atau najis atau binatang!

Karena kondisi banyaknya oknum elite yang pengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan se-SARA tadi, maka betapa banyaknya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan.

Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi. Apalagi di Papua. Hal yang sama seorang Papua, tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang.

Kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita mendapatkan yang buruk dari yang terburuk karena rakyat memilih memang diarahkan, diajari, dihasut untuk memilih yang se-SARA saja. Singkatnya, hanya memilih yang seiman (kasarnya yang sesama manusia).





① Suasana pemilihan calgub di KPUD Bangka Belitung.
 ② Di Belitung Timur bersama Gusdur saat jurkam pilgub Babel 2007.
 ③ Wawancara dengan Metro TV di Bandara Belitung H. AS Hanandjoeddin, saat pilgub Babel 2007.

MEMILIH PEMIMPIN

Pertanyaannya, apakah benar yang kita pilih seiman dengan kita. Jika kita benci korupsi, dan tahu korupsi adalah dosa, apakah kita memiliki iman yang sama dengan seseorang oknum pejabat yang kaya raya karena korupsi. Apakah jika kita beragama sama dengannya sesuai KTP, berarti sudah seiman?

Persoalan mencari alasan dengan sesama manusia (seiman) sebenarnya bukan perihal baru di dunia ini. Seorang nabi yang terkenal dengan kasihNya, yakni Nabi Isa Almasih (Yesus Kristus) juga dicobai oleh seorang Yahudi ahli Taurat.

Katanya: "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"

Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?"

Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri".

Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.

Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: "Dan siapakah sesamaku manusia?"

Jawab Yesus: "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang

Samaria (dianggap kafir/najis oleh orang Yahudi), yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.

Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama

manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?"

Jawab orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."

Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, dan perbuatlah demikian!"

Dari cerita ini, apakah kita akan tetap memilih orang yang tidak perduli akan nasib sengsara rakyat miskin hanya karena kita memiliki agama yang sama di KTP. Bahkan terkenal sebagai pemimpin agama/imam dan ahli kitab. Tetapi yang kita kira tidak seiman justru menunjukkan visi misi program dan karakter yang sudah teruji mampu mensejahterakan rakyat miskin?



① Diskusi dengan para petani Tegal, Jateng dalam rangka pemberian bantuan bibit padi tahun 2007.
② ③ Mendapat pin tokoh reformasi dari Fordeka yang diserahkan oleh Bp. Amien Rais.



Seharusnya kita bisa dengan jelas memilih yang sesama manusia (seiman) adalah orang yang tidak korupsi dan jelas membantu rakyat dalam kesulitan. Bukan memilih yang "seiman" karena tertera di KTP beragama sama.

Di Indonesia, seharusnya tidak ada istilah mayoritas minoritas, karena seseorang yang lahir sebagai suku Jawa adalah mayoritas di Jawa. Tetapi ketika di Papua, dia menjadi minoritas. Demikian juga seorang Bugis di Padang, otomatis menjadi minoritas.

Jawa, Bugis, Batak, Tionghoa dan Padang yang merupakan suku dengan penyebaran paling merata di seluruh Indonesia, dengan kondisi pendidikan dan kemampuan ekonomi di atas rata-rata seharusnya menjadi calon-calon pemimpin yang bisa memberikan rakyat banyak pilihan dalam setiap pemilu, pilkada maupun pilpres.

Meminjam istilah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam menentukan kriteria dalam memilih pemimpin yakni, BTP (Bersih, Transparan, dan

Profesional), maka dapatlah kita optimis, reformasi yang sudah di jalur yang benar dengan adanya pemilu sistim semi distrik, pilkada langsung, dan pilpres langsung, pasti akan menghasilkan pemimpin yang akan mampu mensejahterakan rakyat dengan terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, jika rakyat berani memutuskan yang seiman/sesama manusia adalah yang mau menolong rakyat keluar dari kemiskinan. Bukan yang mengaku seiman karena beragama yang sama di KTP. Melainkan, dengan berpedoman pada ukuran BTP (Bersih, Transparan, Profesional), "Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara."

Janji kalimat ini bisa kita wujudkan jika para elite politik dan rakyat dalam melaksanakan pemilu, pilpres dan pilkada sudah dengan cerdas menjalankan prinsip : PILIH BTP (Bersih,Transparan, dan Profesional) bukan SARA (suku, agama, Ras, dan Antar golongan).







05 KEWAJIBAN INDONESIA TIONGHOA DI PEMERINTAHAN DAN POLITIK

kehidupannya setelah tidak menjabat lagi. Atau, sedikitnya dapat memperoleh modal kapital sebagai pembiayaan politik di pemilu atau pilkada yang akan datang.

Padahal, yang diharapkan oleh bangsa ini adalah adanya "korban" yang rela

mengeluarkan biaya pribadi untuk menjadi pejabat yang tidak mengharap uangnya kembali setelah berhasil menjadi pejabat. Namun, adakah orang dengan keluhuran budi pekerti seperti itu?

Kalau kita merenungkan zaman revolusi kemerdekaan dulu, kondisi

saat itu adalah ketidak-sanggupan "bakal pemerintah Indonesia" menyediakan persenjataan modern dan gaji untuk para pejuang kemerdekaan yang tak hanya rela mengorbankan darah, tetapi juga nyawa. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika semua pejuang revolusi kala itu menuntut fasilitas terlebih dahulu dan berjuang belakangan? Apakah akan ada kemerdekaan Indonesia?

Fakta membuktikan, setelah sebuah pemerintahan Indonesia yang berdaulat secara *de jure* dan *de facto*, barulah kita memiliki persenjataan yang lengkap. Juga gaji maupun tunjangan kepada para tentara yang bertugas menjaga dan membela kedaulatan negara.

Pergolakan politik di Indonesia penuh dengan intrik kekuasaan dan politik uang. Segala macam cara dihalalkan oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuan politik.

Ironisnya lagi, di tengah-tengah seribu macam kekisruhan politik lainnya, lembaga peradilan Indonesia juga diwarnai dengan

adanya 'mafia-mafia' yang memiliki taji kuat dalam menentukan keputusan pengadilan dan produk hukum lainnya. Ditambah lagi dengan kondisi rakyat yang semakin terpuruk. Ini ditandai dengan kenyataan bahwa rakyat tidak memiliki jaminan sosial. Para pekerja tidak mendapatkan upah minimum yang layak karena kemampuan kerja yang sangat terbatas akibat kurangnya pendidikan dan pelatihan.

Di samping itu, semua partai politik menjadi beban negara karena harus mendapat bantuan dari APBN atau APBD. Sedangkan kondisi gaji pejabat tidak sesuai dengan biaya kampanye atau biaya untuk menjadi pejabat. Sehingga menjadi salah satu faktor pemicu mereka untuk melakukan tindak korupsi setelah berhasil duduk menjadi pejabat. Ditambah tentunya karena mental pejabat itu sendiri yang sudah korup.

Lantas, siapakah oknum yang berkewajiban dan berpotensi menyelesaikan semua permasalahan kronis tersebut? Dan, siapakah yang bersedia mengeluarkan uang secara cuma-cuma dan ada resiko modal untuk mendapatkan jabatan tidak kembali?

Jika kalkulasi untung-rugi ini dipakai, maka kemungkinan besar tidak ada satu pun politisi yang bersedia untuk masuk bursa pemilihan umum. Kalau semua politisi tidak bersedia melakukan sebuah pengorbanan, tentu saja harapan APBN dan APBD untuk kesejahteraan rakyat menjadi sirna. Karena hampir semua pejabat legislatif maupun eksekutif berharap uangnya kembali. Bahkan kalau memungkinkan bisa mengeruk keuntungan lebih untuk menjamin



PAHLAWAN REVOLUSI BERADAB

Spirit sama diperlukan untuk mencapai reformasi secara tuntas. Rakyat membutuhkan "pahlawan-pahlawan revolusi yang beradab", atau mereka yang berjuang dengan kertas suara. Bukan dengan peluru dan menyediakan diri dan kekayaannya menjadi pejabat legislatif maupun eksekutif tanpa memikirkan untung-rugi secara materi.

Jika kita memiliki mereka, maka kita akan memiliki pejabat yang akan mampu mengantar kita ke era reformasi. Dimana rakyat akan berdaulat dengan penghasilan dan jaminan sosial yang cukup memadai, dan tentu saja para pejabat akan dibayar dengan nilai yang profesional dan sesuai dengan jabatannya.

Siapakah yang mampu mengambil peran sebagai pahlawan revolusi beradab itu? Bukankah demokrasi berdasarkan suara rakyat (*Vox populi, vox dei*). Sayangnya, kondisi politik saat ini masih menghalalkan segala cara, yang penting asal menang. Tapi, jika ada kaum "pejuang" dari kelompok minoritas yang hendak menyediakan dirinya, yang menjadi pertanyaan, bukankah akan menghadapi kendala primordialisme?

Nuansa SARA (primordialisme) akan dimainkan oleh para "perampok" yang mengaku "pejuang" dari oknum mayoritas di berbagai daerah. Sebagian besar rakyat juga lebih suka memilih yang se-SARA, tidak peduli yang dipilih memenuhi unsur BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) atau tidak.



Indonesia Tionghoa secara umum memiliki persepsi (lebih ke arah "tahu diri") seperti kondisi di atas. Hal ini membuat sebagian Indonesia Tionghoa menjadi apatis. Bahkan memilih golput dalam pemilu maupun pilkada. Memang ada juga yang masuk ke politik,

tetapi mungkin sifatnya hanya sekedar "ikut". Bahkan ada juga oknum yang memanfaatkan untuk peluang bisnis dan perlindungan bisnisnya. Padahal, yang dibutuhkan adalah mereka yang berani melawan untuk rakyat agar APBN maupun APBD bisa dinikmati oleh rakyat.



Saat bersantai di Zhenzhen, Cina

BERDIALOG DENGAN PLURALITAS

Fakta politik, golput tidak berarti bisa melawan. Semakin kita golput dan apatis, semakin murah kursi pejabat yang tersedia. Jika yang memiliki uang (pemberi kerja) tidak bersedia menyediakan diri menjadi "pejuang" revolusi yang belum selesai ini, maka pengangguran/pencari kerja/opurtunis yang akan memiliki kursi-kursi pejabat tersebut.

Lambang Burung Garuda Pancasila dengan jelas terdapat pita Bhinneka Tunggal Ika, ini membuktikan tanpa memegang erat pita Bhinneka Tunggal Ika (apalagi pitanya hilang), maka Burung Garuda Pancasila kita akan goyah. Bahkan akhirnya jatuh karena tidak memiliki tempat untuk berpegang.

Dengan dasar itulah, Indonesia Tionghoa harus membuang pikiran yang sudah terbentuk sejak zaman kolonial, bahwa Indonesia Tionghoa adalah "penumpang" atau bukan "asli".

Saya sendiri sudah mulai menjalankan persepsi baru ini di Kabupaten Belitung Timur. Saya yakin masih ada 1/3 rakyat "mayoritas" yang tidak termakan oleh hasutan "gaya kolonial" dengan unsur SARA-nya. Saya juga yakin, yang rasialis itu hanyalah "oknum" elite politik yang sesungguhnya adalah "kolonialisme-kolonialisme" baru yang menjajah bangsa/rakyat sendiri dengan hak korupsinya (kekayaan bertambah tanpa sesuai dengan penghasilan maupun bukti pembayaran pajak penghasilan).

Kondisi Kabupaten Belitung Timur memiliki komposisi penduduk muslim 93,25% dan Kristen hanya 0,82%. Saya seorang pemeluk agama Kristen.

Pada Pemilu 2004, saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB). Hasil yang diperoleh hanya 2,7% untuk 2 daerah pemilihan. Kampanye dilakukan

Bedanya kami melakukan pendidikan politik
menyadarkan rakyat memilih bukan karena baju kaos

seperti oleh partai-partai lain, dari baju kaos sampai bantuan-bantuan sosial. Bedanya kami melakukan pendidikan politik, menyadarkan rakyat memilih partai bukan karena baju kaos. Tapi, memilih calon berintegritas untuk duduk di DPRD. Oknum-oknum di partai lain menggunakan kampanye berbau SARA menghantam kami.

Setelah mendapat kursi di DPRD karena sisa pembagian suara, saya mulai melakukan aksi "pejuang revolusi" yang tidak memanfaatkan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang fiktif, maupun kunjungan-kunjungan kerja yang tidak perlu. Apalagi menerima amplop pada setiap kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta.

Tahun 2005, saya mencalonkan diri menjadi bupati. Sekilas, tentu saja tidak masuk akal jika dihitung dari unsur primordialisme. Apalagi kampanye negatif dengan unsur SARA tetap dilakukan oleh oknum-oknum elite politik yang tidak bertanggung jawab. Tapi, hasilnya, kami memperoleh suara 37,13% dengan tidak menggunakan kampanye secara umum seperti baju kaos dan *money* politik lainnya. Biaya yang kami habiskan untuk mengikuti pencalonan kala itu hanya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setelah menjadi Bupati, semua visi misi yang menjadi wewenang bupati mulai saya jalankan dalam 5 bulan. Tidak ada 1 sen uang yang diterima saya sewaktu sebagai bupati dari siapapun termasuk hadiah apapun.

Pada saat pemilihan gubernur di Bangka Belitung, rakyat Belitung Timur yang 93,25% muslim memberi suara kepada pasangan kami sebesar 63%. Itupun masih banyak hak suara dihilangkan secara "sistimatis", sebagaimana dibuktikan di Mahkamah Agung. Padahal, biaya yang dihabiskan hanya di bawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Semua gambaran di atas menunjukkan bahwa politik akal sehat yang mendidik rakyat memilih pejabat berdasarkan unsur BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) bukan unsur SARA (Suku, Agama, dan Ras) bisa dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mayoritas beragama Islam.

Lantas, apa hubungannya dengan peluang/kewajiban Indonesia Tionghoa? Suka atau tidak suka, rakyat yang ada di hampir semua daerah pemilihan (kecamatan), sekaligus memiliki ekonomi cukup mapan dan berpendidikan minimal SMA adalah Indonesia Tionghoa.

Otonomi daerah jelas memberi kekuasaan yang cukup besar di daerah tingkat II untuk mensejahterakan dan membangun daerahnya. Karenanya, jika semua Indonesia Tionghoa terpenggil menjadi "pejuang" revolusi beradab ini dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, maka peluang untuk memenangkan kursi DPRD ini sangat besar. Misalnya, sebuah daerah pemilihan harga sebuah kursi rata-rata 1.000-20.000 pemilih saja di seluruh kabupaten di Indonesia. Untuk mendapatkan kursi bisa dari sisa kursi yang ada, artinya bisa dengan suara pemilih 500 saja sudah menjadi anggota DPRD tingkat II.







① ② Kunjungan ke Cina daratan untuk menjaring investor.





Jika semua pemuda-pemudi Indonesia Tionghoa menyediakan diri menjadi "patriot-patriot/pahlawan-pahlawan revolusi beradab", maka DPRD akan diisi oleh pejabat-pejabat yang berpenghasilan dan bersedia berkorban agar bangsa ini mampu menggaji pejabat dengan layak dan profesional di 10 tahun yang akan datang, sekalipun mungkin mereka bisa termasuk yang tidak sempat menikmatinya. Bukankah banyak pahlawan revolusi kemerdekaan yang tidak sempat melihat kemerdekaan karena gugur dalam peperangan. Plato menulis : *" He who refuses to rule is liable to be ruled by one who is worse than himself "* (Orang yang menolak untuk memimpin cenderung akan dipimpin oleh orang yang lebih buruk dari dirinya).

Adanya "pahlawan revolusi beradab" menjadi anggota DPR RI, akan menghasilkan Undang-Undang yang jelas dan akan membangun sistem anti korupsi. Seperti misalnya, UU Pembuktian Terbalik soal harta kekayaan, diijinkannya calon independen dari Tingkat II sampai Presiden, diijinkannya partai lokal di seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah Aceh.

Lantas, apakah dengan fakta itu perlu dirikan Partai Tionghoa dengan berbasiskan pengurus PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia? Apalagi Dana tidak masalah karena bukankah Indonesia Tionghoa terkenal sebagai donatur partai-partai politik yang ada?

Tentu saja tidak demikian. Dalam negara Bhinneka Tunggal Ika ini sangatlah tidak bijak membangun partai yang berunsur "SARA". Saya hanya berharap banyak pemuda Tionghoa, dengan perekonomian dan pendidikan di atas rata-rata rakyat, mau diutus menjadi pejuang revolusi beradab menuju Indonesia Baru yang berkeadilan, demokrasi, transparan dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Pertanyaannya siapa yang mau diutus? Saya sendiri bersedia diutus. Lalu, bagaimana dengan saudara. Apakah saudara bersedia diutus? Jika semua berkata : "ini aku, utuslah aku!" maka tidak sampai 20 tahun ke depan kita mungkin bisa menemukan data pribadi Presiden Republik Indonesia dengan nama: Indonesia/Asing, beragama bukan Islam, bukan suku Jawa, dan orang tuanya atau kakeknya masih bernama "tiga huruf". Semoga impian ini menjadi kenyataan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Ber-Bhinneka Tunggal Ika.





06

BELAJAR SAMPAI KE NEGERI TIONGKOK

Ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang saya dapatkan ketika belajar agama Islam di SMP Negeri 1 Gantung Belitung Timur. Mengapa Nabi Muhammad SAW menyebut "Tiongkok" bukan Eropa saja? Teks Hadis itu dalam bahasa Arab berbunyi: "Uthulubul 'ilma walaw bishshiin". Hadis ini oleh para ulama dikategorikan sebagai Hadis Masyhur yang berarti Hadis ini adalah salah satu Hadis yang populer di kalangan pemeluk Islam.

Beberapa ulama lain berpendapat Hadis ini adalah palsu, alasannya karena di zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab belum mengenal negeri Tiongkok. Alasan ini mungkin kurang tepat karena Tiongkok adalah negeri tua yang sudah lama masyhur. Nabi Muhammad SAW hidup antara tahun 571-632, dan saat itu di Tiongkok berdiri Dinasti Sui yang kemudian digantikan oleh Dinasti Tang.

Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, hanya terdapat dua negara adikuasa dunia, yaitu Tiongkok (Dinasti Han) dan Roma. Hubungan kedua negara telah terjalin dan dibuktikan dengan adanya "Jalur Sutra" yang menghubungkan perdagangan kedua negara. Para pedagang

Arab Persia menjadi perantara hubungan dagang kedua negara tersebut. *National Geographic* pernah mendokumentasikan penelitian adanya keturunan orang-orang Roma di Xinjiang dan Gansu yang diperkirakan merupakan keturunan prajurit Roma yang ditawan oleh tentara Tiongkok.

Hubungan antara Tiongkok dan Arab Persia tetap baik pada masa sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW. Sampai

sekarang, banyak keturunan Arab di Provinsi Fujian dan Guangdong. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, Tiongkok dipandang sebagai wilayah dengan peradaban yang amat maju. Ekspedisi Islam pertama ke Tiongkok terjadi pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan dan dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqash. Sebagai balas penghormatan, kaisar Yung Wei memerintahkan pembangunan mesjid pertama di Tiongkok.



- ① Bersama tokoh agama Katolik di Bangka Belitung.
- ② Akrab dengan segala kalangan ciri khas Ahok bahkan dengan supir bus sekalipun.
- ③ Presentasi menjangkau investor di Cina.



- ① Penajakan investasi daerah wisata Belitung Timur di kampung Simoreun Jawa Barat.
- ② Berfoto bersama profesor China asal Indonesia dengan buku karyanya.

TINGGALKAN ZONA NYAMAN

Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan atas arti perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Guru agama Islam saya pernah mengatakan bahwa arti Hadis di atas adalah kalau hendak menuntut ilmu kita harus ke tempat yang paling jauh, asal bisa mendapatkan ilmu yang tinggi. Saya tidak puas dengan jawaban ini, karena bagaimana dengan pemeluk Islam di Tiongkok itu sendiri? Tentulah Tiongkok bukan negeri yang jauh bagi mereka.

Lalu ada juga yang memberikan jawaban karena budaya di Tiongkok sedemikian tua dan Islam di Indonesia berasal dari pedagang/da'i Tionghoa yang datang ke Indonesia. Termasuk Laksamana Cheng Ho, seorang Laksamana muslim Dinasti Ming yang memimpin ekspedisi laut jauh lebih besar dari ekspedisi Colombus menurut Gavin Menzies.

Saya tetap tidak puas dengan jawaban di atas, karena bagi saya kalau mau belajar tentang Islam dan budayanya tentu harusnya ke Arab. Bukan ke Tiongkok.

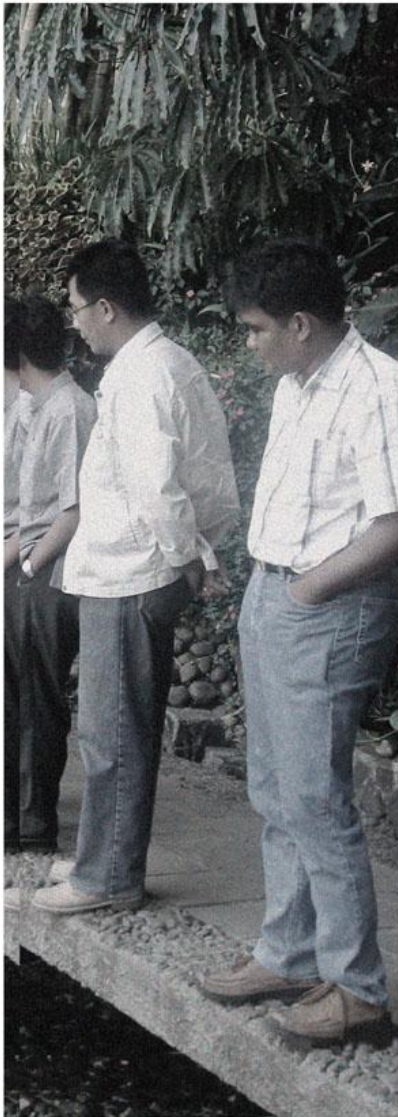
Tentu saja saya juga mendapatkan sesuatu dari pernyataan di atas. Kemudian saya mencoba mendefinisikan sendiri arti penting Hadis itu, yaitu kita harus berani meninggalkan kampung halaman ("zona nyaman") untuk pergi merantau menuntut ilmu atau berdagang sekalipun ketempat yang jauh dan mungkin kurang nyaman bagi kita karena rasanya asing. Tetapi mungkin ini hanyalah upaya saya



untuk sekedar menghibur diri sendiri akibat ketidak-puasan batin atas jawaban-jawaban yang didapatkan.

Pertanyaan arti perkataan di atas terus saya bawa sampai sekolah SMA dan kuliah di Jakarta. Sayangnya, tetap tidak ada teman yang bisa memberikan penjelasan

secara relevan dan "masuk akal" dengan konteks Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Sehingga ada kaitan yang amat erat antara Indonesia dan ke-Islam-an, karena semua budaya suatu bangsa di pengaruhi oleh keyakinan bangsa tersebut.



.. anggaran pendidikan ini dapat dipenuhi dengan memangkas biaya perjalanan dinas pejabat yang terlalu besar dan menjadi "sumber penghasilan" ..



PEMAHAMAN BARU

Setelah menamatkan kuliah S2, saya kembali ke kampung halaman membangun usaha. Kebetulan saya menonton *vd* kuliah tentang filsafat Tiongkok oleh Pdt. Stephen Tong. Saat itu saya mulai "menemukan" sendiri makna perkataan Nabi Muhammad SAW tentang "belajar sampai ke negeri

Tiongkok". Ini tentu saja ada hubungannya dengan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Ada dua hal penting yang saya dapatkan dari ajaran filsafat Tiongkok. Pertama adalah ajaran tentang pendidikan: "Kalau ada pendidikan, maka tidak boleh ada pengotakan/diskriminasi". Kedua adalah tentang sistim yang jujur: "Kalau

atasnya lurus, maka yang bawah tidak berani tidak lurus". Saya juga mengamati tulisan hoki/rezeki dalam aksara Tionghoa yang menyerupai gambar petak sawah.

Dari ketiga hal di atas, saya mulai "menafsirkan sendiri" arti belajar sampai ke negeri Tiongkok dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan saudara sebangsa dan setanah air yang mayoritas



Arab berhincang di komunitas warung Kopi.
Tempat berkumpul khas daerah Bektung.

percaya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW.

Pertama, seharusnya kita menerapkan sistem nilai yang telah dipraktekan di Tiongkok sejak 1000 tahun SM, yaitu sistem pendidikan tidak boleh diskriminatif. Di negeri yang mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia ini ternyata pendidikan sangat diskriminatif. Mulai dari biaya pendidikan yang demikian mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat banyak. Rakyat miskin hanya mampu menjangkau pendidikan bermutu rendah.

Kalau kita menafsirkan "tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok" sebagai usaha untuk mencontoh system pendidikan Tiongkok bukan tafsir *litterlijk* "bersekolah sampai ke negeri Tiongkok", maka konsekuensinya adalah wajib melaksanakan program pendidikan bermutu tinggi yang merata di seluruh daerah. Sehingga seluruh rakyat bisa memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan bermutu baik yang selama ini menjadi hak prerogatif orang kaya dan "elite berkuasa" saja.

Bukankah amanat UU Pendidikan mewajibkan 20% APBD dan APBN harus dilaksanakan? Kewajiban anggaran Pendidikan ini dapat dipenuhi dengan memangkas biaya perjalanan dinas pejabat yang terlalu besar dan menjadi "sumber penghasilan tambahan". Kalau perlu beban anggaran perjalanan dinas pejabat itu benar-benar ditiadakan. Jika semua rakyat mampu mengakses pendidikan bermutu yang merupakan salah satu hak paling mendasar, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan besar.

Kedua, adalah tentang sistim kepemimpinan. Adagium "kepala yang lurus maka yang bawah tidak berani tidak lurus" jelas menggambarkan kalau pemimpinnya jujur tentulah seluruh jajaran di bawahnya tidak berani tidak jujur.

Adanya Pilpres dan Pilkada langsung sudah merupakan jalur yang tepat bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang lurus. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah dan presiden kembali melalui mekanisme dipilih oleh anggota DPRD dan DPR, jelas



akan menghilangkan kesempatan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang lurus tadi.

Kalau sampai saat ini sistem pemilihan langsung "dirasakan" masih gagal, jelas hal ini bukan merupakan kesalahan sistim.

"Kegagalan" itu disebabkan kemandulan undang-undang yang masih bisa meloloskan "mantan koruptor" menjadi calon pemimpin di samping adanya oknum rakyat rasialis/fanatik yang cenderung memilih secara "sempit".

Kalau ada pendidikan,
maka tidak boleh ada
pengotakan/diskriminasi



Untuk itu, rakyat perlu dididik memilih pemimpin yang lurus barulah di bawahnya tidak berani tidak lurus. Bisa dibayangkan kalau pemimpinnya sendiri mantan koruptor atau "cacat" secara moral dan hukum tentulah jajaran di bawahnya tidak ada yang takut.

Yang ketiga, adalah tentang petak sawah melambangkan kata rezeki/hoki/kaya. Tiongkok tidak mengenal prinsip hak milik sampai kedatangan Nabi

Isa kedua kalinya ke dunia ini. Negeri kita adalah negara agraris, jadi sudah selayaknya kita ini "hoki" dan kaya. Tapi nyatanya tidak demikian. Tahun 2006, PBB melaporkan Indonesia menempati peringkat negara termiskin nomor 110 dari 177 negara di dunia, atau terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Saya kira, kondisi sekarang belum terlalu jauh berbeda sejak laporan PBB itu dikeluarkan.

Sebagai negara agraris, ternyata di Indonesia banyak petani bekerja di atas lahan milik orang lain. Bahkan sawah yang dibuka oleh pemerintah dengan investasi milyaran untuk sawah dan irigasinya telah menjadi milik "petani berdasi" yang jika daerahnya menjadi daerah industri dan lebih menguntungkan. Maka terdapat banyak kasus sawah dengan irigasi yang baik dijual begitu saja menjadi kawasan industri. Inilah salah satu sebab mengapa kita menjadi pengimpor beras.

Apa yang akan terjadi jika setiap sawah dan irigasi yang dicetak oleh pemerintah dengan konsep seperti di Tiongkok? Artinya seluruh sawah tersebut adalah milik pemerintah dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun, kecuali kepada petani penggarap asli yang mau menggarap sawah tersebut. Jika ini yang kita lakukan, maka seluruh lahan sawah tetap terpelihara dan tidak ada investasi irigasi pemerintah yang sia-sia.

Sawah-sawah yang digarap oleh petani penggarap akan tetap menjadi milik petani penggarap turun temurun selama masih digarap oleh yang bersangkutan bukan disewakan. Setiap desa perlu mendirikan toko koperasi yang menyediakan obat-obatan, pupuk dan benih dengan sistim konsinyasi dari dinas pertanian maupun departemen pertanian. Setelah terjual dan membayar akan dititipkan lagi, bulog juga bisa menitip ke toko koperasi ini menjadi agen pembeli gabah petani.

Dengan melaksanakan tiga hal seperti sistem yang ada di Tiongkok sejak zaman 1000 tahun SM, maka Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Apakah sulit menjalankan ini? Saya yakin tidak, asal mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam mau menjalankan perintah Nabi Muhammad dengan taat. Sisanya yang minoritas akan mengikuti arus perubahan ini sebagai budaya.

Mudah-mudahan bisa ditaati anjuran "belajar sampai ke negeri Tiongkok", ditambah dengan memberlakukan jaminan pendidikan bagi seluruh rakyat, dengan memilih pemimpin/kepala yang lurus, dan memberdayakan setiap jengkal tanah pertanian dengan sistim kepemilikan oleh pemerintah bukan oleh sekelompok "tuan tanah".



07

NKRI VS USA

Tunggal Ika, maka burung Garuda Pancasila akan jatuh atau goyah. Sebab, tidak memiliki pegangan atau pijakan.

Bandingkan dengan lambang negara USA. Jika hal yang sama terjadi, burung elangnya tidak akan jatuh apalagi goyah, karena pita "bhinneka tunggal ika" ditaruh di bagian atas dari burung elangnya.

Sang teman lantas

mengatakan paling hebat demokrasinya USA. Saya katakan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan NKRI. Sang teman tidak mau kalah. Dia mengajukan pertanyaan kenapa hasil pilpres dan pilkada yang ada tidak sanggup meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan malahan jumlah orang miskin terus bertambah? Bukankah rakyat telah diberi hak memilih pemimpin yang terbaik? Dan, bukankah NKRI memiliki banyak sumber

Seorang teman yang merupakan lulusan United States of Amerika (USA) dengan bangga menyatakan bahwa negara Paman Sam adalah negara yang paling hebat demokrasinya.

Tapi, dalam sebuah "perdebatan" kami, saya menyatakan bahwa jika

dibandingkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara yang ia bangga-banggakan itu tidak ada apa-apanya. Buktinya? NKRI sudah mampu melaksanakan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung sebelum merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke 60. USA?

Sang teman tidak mau kalah mengajukan lagi bahwa USA negara yang *gentleman*.

Saya katakan tidak juga. Kalau tidak percaya lihat lambang negaranya. Coba cermati bahwa pita tulisan "bhinneka tunggal ika"-nya (E Pluribus Unum) ditaruh di "atas" burung elangnya. Sangat beda dengan NKRI berani dengan "gentleman" menaruh Bhinneka Tunggal Ika-nya menjadi pegangan burung Garuda Pancasila. Artinya, jika terjadi perpecahan akibat SARA (suku, agama, ras) di NKRI, dengan menghilangkan pita Bhineka



Debat publik dalam pilgub Bangka Belitung.



daya manusia yang berpendidikan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?

Seharusnya demokrasi yang berhasil pasti diikuti oleh meningkatnya investasi yang berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI).

Saya tidak menjawab secara langsung. Tetapi mencoba merenungkan kembali

perjalanan hidup saya di dunia politik sejak tahun 2003 sampai 2007. Mulai dari mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai yang baru dibentuk, mengikuti Pemilu 2004 untuk menjadi anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Belitung Timur, menjadi anggota DPRD Belitung Timur selama 7 bulan, mengikuti Pilkada langsung

Bupati Belitung Timur yang pertama, menjadi Bupati Belitung Timur selama 16 bulan (dari Agustus 2005 sampai Desember 2006), mengikuti Pilkada langsung Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 22 Februari 2007 dan menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB sejak Juni-September 2007.

TERJANGKIT PENYAKIT "PEMIMPIN YAHUDI"

Dalam merenungkan semua pengalaman tersebut, saya terbayang adegan dalam film *The Passion of Christ* yang dibuat oleh Mel Gibson. Dalam adegan pengadilan Nabi Isa Almasih (Yesus Kristus) di hadapan Gubernur Pilatus, Pilatus menawarkan kepada rakyat, siapa yang akan dipilih untuk dibebaskan sesuai dengan tradisi Hari Raya Yahudi. Apakah Nabi Isa yang tidak didapatinya bersalah sesuai dengan tuduhan dari para imam dan pemimpin Yahudi, atau Barabas seorang pemberontak, perampok dan pembunuh?

Seluruh rakyat memilih Barabas karena hasutan para elite Yahudi (imam kepala, ahli taurat dan pemimpin-pemimpin sipilnya).

Hal yang hampir sama juga saya alami di dalam pemilu maupun pilkada langsung. Para oknum elite banyak yang terjangkit penyakit "pemimpin yahudi" seperti dalam filmnya Mel Gibson tersebut. Artinya, di dalam setiap perebutan suara rakyat, bukan mengadu visi misi atau program yang terbaik. Melainkan mengadu dari unsur SARA, walaupun perampok atau pembunuh tetap harus dipilih oleh rakyat karena hasutan se-suku, se-agama atau se-ras.

Akibat dari inilah, Pilkada akan memilih yang buruk dari yang terburuk. Bukan yang terbaik dari yang baik. Apalagi kita tentu saja mengharapkan pejabat publik terpilih adalah yang terbaik dari yang terbaik (*best of the best*, bukan *best of the good*, apalagi *bad of the worst* bahkan *worst of the worst*). Dengan tidak mengijinkan atau mempersulit adanya calon independen di luar partai politik yang ada di dalam setiap pilpres maupun pilkada langsung, semakin tipis harapan rakyat mendapatkan "*best of the best*".

Rakyat telah dihadapkan pada satu titik putus asa dan selalu dilupakan setelah selesainya pesta demokrasi. Bahkan merasa tidak memiliki harapan lagi karena siapapun yang terpilih hasilnya akan sama saja.

Untuk itu semua pihak perlu mulai mengkampanyekan: "Bahwa bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara".

Jika kita yang mendambakan burung Garuda Pancasila unggul atas burung elangnya Amerika, maka dalam setiap pemilu, pilpres dan pilkada langsung, kita harus berani ikut ambil bagian. Baik mencalonkan diri maupun dengan mendidik rakyat menjadi rakyat yang cerdas dalam memilih, dengan semboyan

Para oknum elite banyak yang terjangkit penyakit "Pemimpin Yahudi" seperti dalam film Mel Gibson tersebut.



"Pilih yang BTP (Bersih Transparan dan Profesional) bukan SARA (Suku Agama dan Ras). Semoga dengan cerdasnya rakyat dalam memilih, demokrasi Indonesia akan diikuti dengan naiknya investasi dan indeks Pembangunan Manusia rakyat Indonesia. Dan semoga "perdebatan" ini dapat memberi sumbangsih dalam *nation-building* Indonesia. Semoga.

- ① Foto saat mencalonkan diri menjadi bupati.
- ② Ahok bupati yang selalu dekat dengan rakyat kecil.
- ③ Suasana pendaftaran pilgub Bangka Belitung di KPU.





08 SUMPAAH JABATAN DENGAN NAMA TUHAN (YANG PIKUN?)

itu PNS rata-rata telah memiliki anak-anak yang sudah menginjak usia kuliah. Bisa dibayangkan jika PNS tidak memiliki usaha sampingan atau tambahan, apa bisa anaknya menyelesaikan kuliah?

Apa yang akan dia lakukan jika

ada rekanan Pemda misalnya, yang memberikan uang terima kasih? Sekalipun PNS tidak memintanya, bukankah ini rezeki yang tidak boleh kita tolak? Tapi, jika kita bukan pejabat, apakah yang bersangkutan juga memberikannya?

Saya bersumpah, tidak akan menerima apapun juga, dari siapapun juga yang ada hubungan dengan jabatan saya." Kata-kata itu pasti diucapkan dengan tegas oleh setiap orang yang dilantik sebagai pejabat pemerintah. Peralihannya, sumpah ini adalah wajib hukumnya bagi pejabat di lingkungan pemerintahan.

Adalah para rohaniawan yang akan mengambil sumpah jabatan pejabat yang akan dilantik. Tanpa kehadiran rohaniawan, maka acara pelantikan bisa diundur. Bahkan dibatalkan, meski pejabat yang akan melantik telah hadir.

Di antara semua kalimat sumpah jabatan yang harus diucapkan ada satu paragraph yang sangat mengganggu dengan kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh semua PNS (pegawai negeri sipil), yakni kalimat tersebut, tentang tidak boleh menerima apapun juga dari siapapun juga yang ada hubungan dengan jabatannya atau dapat diduga ada hubungan dengan jabatannya.

Realita hidup yang dihadapi oleh PNS adalah, untuk bisa mencapai posisi cukup tinggi dengan gaji Rp2-3 juta minimal dibutuhkan 20 tahun, dimana pada masa





- ① Kampanye pilgub di Bangka Barat.
- ② Pelantikan bupati dengan rekan separta.
- ③ Penjajakan investasi di Belitung Timur dengan investor dari Korea.

DIGODA HADIAH DAN KOMISI

Ketika saya dilantik menjadi bupati Kabupaten Belitung Timur, ada seorang rekan bisnis saya yang memberikan sebuah kulkas yang cukup besar. Pertanyaannya apakah saya boleh menerimanya? Bukankah sumpah jabatan mengatakan tidak boleh menerima apapun juga yang dapat atau dapat diduga berhubungan dengan jabatan saya? Namun, bukankah ini pemberian seorang sahabat?

Saya tentu saja senang menerima pemberian, karena pada hakekatnya semua orang suka mendapat pemberian. Persoalannya, isi sumpah jabatan yang saya ucapkan dengan menaruh tangan di atas Alkitab dan dalam nama Tuhan Yang Maha Tahu, sangat mengganggu nurani saya.

Kenapa untuk menolong para pejabat agar dengan mudah menerima semua bantuan tadi, kalimat tidak boleh menerima tadi pada saat sumpah jabatan dihilangkan saja? Bukankah lebih mudah menghilangkan tulisan yang manusia buat daripada menghilangkan Firman Tuhan yang jelas tidak bisa kita ubah?

Bukankah banyak sekali oknum PNS yang terpaksa melanggar sumpah jabatan karena terdesak oleh kebutuhan susu anak-anaknya sampai untuk keperluan kuliah anak-anaknya? Memang banyak juga oknum PNS yang melanggar untuk punya harta cukup sampai 7 turunan dengan istri sampai 4 orang.

Kalau kita mau sedikit membela/ "membenarkan diri" dalam hal ini, bukankah PNS yang terpaksa melanggar demi untuk kebutuhan sandang pangan dan biaya pendidikan anak-anaknya lebih banyak dari pada yang untuk mampu beristri 4 dengan harta sampai 7 turunan?

Lantas, apakah dengan kondisi di atas tetap dibenarkan melanggar sumpah jabatan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Tahu? Saya kutip perkataan seorang bijak (Agur bin Yake) kepada Tuhan yang dikumpulkan dalam buku hikmatnya Nabi Sulaiman. Bunyinya demikian: "dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kau tolak sebelum aku mati, yakni : jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan



berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu, dan berkata: siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku".

Dengan melihat pergumulan seorang bijak di atas, tentulah kita bisa memaklumi jika ada oknum PNS yang terpaksa melanggar sumpah jabatan demi kebutuhan sandang pangan dan pendidikan anak-anaknya. Namun, apakah dibenarkan melanggar sumpah dengan alasan seperti itu? Agur bin Yake tidak melanggar, makanya ia

meminta jangan dia menjadi miskin. Jika PNS tidak memiliki usaha sampingan, apakah ia mampu membantu sang anak menyelesaikan pendidikan mereka.

Bagaimana dengan saya sebagai bupati yang telah menghabiskan uang cukup banyak untuk kampanye selama pilkada berlangsung? Apakah saya tidak boleh mengambil kembali untuk menutup uang yang telah saya habiskan? Apalagi hanya sebuah kulkas pemberian rekan bisnis saya sebelumnya?

Saya mulai menduga kulkas yang diberikan ada hubungan dengan jabatan saya. Kenapa? Mudah sekali menduganya, karena pada waktu saya menikah dan

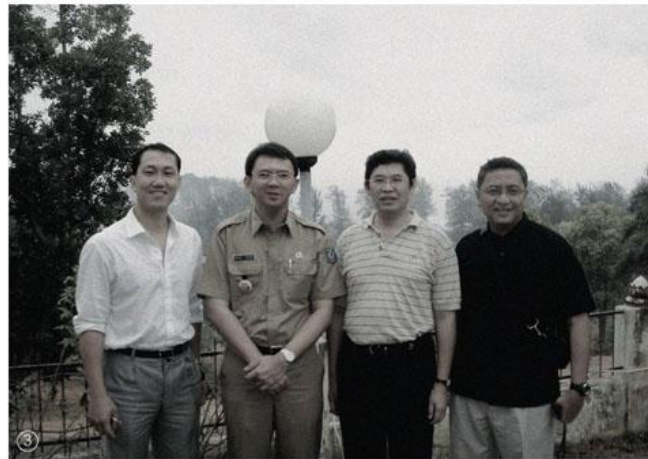


Motivasi saya
menjadi bupati bukan
untuk mengeruk
keuntungan pribadi.



waktu ayah saya meninggal dunia, sang teman hanya memberikan uang pernikahan maupun uang duka tidak melebihi Rp200.000,-. Artinya, kulkas yang jutaan pastilah bukan untuk saya pribadi yang dia kenal, tetapi untuk jabatan saya sebagai bupati, karena itu demi sumpah di hadapan Allah Yang Maha Tahu, saya menolak pemberian tersebut.

Di samping karena sumpah, ada kewajiban melakukan gratifikasi setiap penerimaan kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Ini artinya memang tidak boleh menerima apapun juga.





- ① Penjajakan investor lokal di Belitung Timur.
- ② Kerao menjadi idola rakyat kecil. Bersama para kuli porter di Pangkal Pinang.

Sepanjang menjabat bupati, saya ternyata hampir setiap hari juga harus berhadapan dengan pilihan apakah memutuskan untuk mentolerir/kompromi terhadap sumpah jabatan atau tetap berpegang pada sumpah jabatan tersebut.

Sebagai contoh, ada tawaran untuk menitipkan 5% dari nilai proyek-proyek yang ada di APBD. Jika proyek setahun ada Rp70 milyar, artinya kalau saya menerima, bisa mendapat Rp3,5 milyar per tahun. Belum lagi "upeti-upeti" atau "sumbangan sukarela" dari para pengusaha golongan C, yang tentu saja dikompensasi dengan surat keputusan bupati tentang besaran pajak yang harus dibayar sesuai ukuran kapal/tongkang yang mereka gunakan. Artinya, keputusan yang meringankan jumlah redistribusi/pajak yang dibayar oleh mereka pada saat pengiriman.

Jika dihitung 10 saja yang memberikan sumbangan Rp20juta/bulan, maka tiap tahun bisa mendapatkan Rp2,4 milyar. Belum lagi dari perkebunan sawit yang



sudah beroperasi, termasuk yang baru mau mengajukan lahan, sudah pernah ada yang perkenalan saja telah memberikan Rp300 juta dan ada juga yang memberi hadiah berupa jam tangan rolex emas. Kalau di hitung secara kasar, paling tidak dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan Rp 6-7 milyar per tahun.

Fantastisnya lagi, jika menjadi bupati selama dua periode atau 10 tahun, tentu saja bisa dapat Rp70 milyar diluar bunga bank atau investasi di unit *link* asuransi yang rata-rata bisa memberikan penghasilan 20% per tahun.

Jadi kesimpulannya, dengan gaji bupati yang hanya Rp6 juta per bulan dengan biaya kampanye yang bervariasi dari Rp500 juta – Rp3 milyar, tentu saja saya tidak kembali modal. Sebab, selain saya telah bersumpah bahwa tidak akan menerima sesuatu apapun yang ada kaitannya dengan jabatan, motivasi saya untuk menjadi bupati bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tapi karena didasari keinginan yang kuat untuk mengubah kondisi masyarakat yang sebelumnya terlupakan ke arah yang lebih sejahtera.





BUAH ANTI KORUPSI

Motivasi dan tindakan saya selama menjadi Bupati Belitung Timur itu ternyata direkam oleh Majalah Berita Minggu Tempo, sehingga saya kemudian dimasukkan sebagai 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia (baca Tempo edisi khusus tokoh pilihan, pada edisi 25-31 Desember 2006).

Karena sikap anti korupsi dan patuh pada sumpah jabatan untuk tidak menerima apapun juga, saya mendapatkan penghargaan dari Tiga Pilar Kemitraan, sebuah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, sebagai penyelenggara negara anti korupsi di tahun 2006.

Lalu kenapa banyak yang masih *ngotot* mau jadi bupati/walikota? Masih ada dana taktis yang bisa digunakan, tetapi itu bukanlah penghasilan. Jika dijadikan penghasilan, harusnya dikenakan pajak penghasilan. Jadi sebenarnya, sangat mudah untuk menangkap pejabat yang korup, jika kekayaannya bertambah setelah menjabat, maka wajiblah ia membuktikannya dengan pajak penghasilan yang dia setorkan. Masalahnya, masih banyak oknum pejabat yang bebas menjabat tanpa pernah melaporkan harta kekayaannya dan ada juga yang masih belum punya NPWP.

Ada lagi cara mencari uang yang "halal" dengan memanfaatkan bisnis yang dimiliki oleh pejabat. Misalnya, saya yang memang seorang pengusaha pertambangan yang

memiliki alat berat dan angkutan truk dumping, tentu saja dengan mudah bisa membuat perjanjian bisnis dengan pemilik tambang untuk menyewa alat-alat saya dengan harga yang spesial. Atau yang lebih kasar lagi, saya menguasai seluruh ijin tambang yang ada, dengan nama orang lain, saya menitipkan saham kosong 10%. Ini adalah cara menerima uang tanpa mencuri lewat APBD atau APBN.

Pertanyaannya kembali adalah sumpah jabatan yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Untuk itu, sangat relevan yang sering ditulis oleh Sdr Christianto Wibisono bahwa harus ada UU konflik kepentingan bagi pengusaha yang menjadi penguasa, agar segala bisnisnya harus diserahkan sebuah badan resmi yang mengurusnya.



Terima Kasih

Atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepulauan Bangka Belitung sehingga kami terpilih sebagai 10 tokoh yang membawa perubahan bagi Indonesia versi Majalah Tempo



Ir Basuki T Purnama, MM

Dibawah kepemimpinannya, pemerintah Belitung Timur membebaskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas negeri. Belasan siswa berprestasi Bangka dikirim melanjutkan belajar gratis ke Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Bangka - Belitung. Setiap Siswa itu disubsidi Rp. 1 Juta per bulan untuk yang di Jakarta dan separuhnya untuk Bangka.

Bupati juga menggratiskan biaya pengobatan warganya dari biaya dokter, obat, rumah sakit, hingga ambulans. Bahkan sampai opname ICU di Rumah Sakit Propinsi. Begitu juga halnya dengan biaya bersalin.

"Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi," ia menjelaskan.

Selain pendidikan dan kesehatan, Bupati menyediakan dana untuk warga yang meninggal. Dengan syarat membuat akta kematian, keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan Rp 500 ribu. (Tempo)

(dikutip dari Majalah TEMPO Edisi Khusus 25-31 Desember 2006, 10 Yang Mengubah Indonesia)





BERANI KELUAR DARI ZONA NYAMAN

Kembali ke kondisi gaji PNS dan pejabat yang kecil secara resminya. Jelas solusinya adalah menaikkan gaji para PNS dengan pemberlakuan UU pembuktian terbalik atau Kepres pembuktian terbalik soal harta untuk seluruh PNS dan pejabat publik. Jika tidak, kondisi yang ada akan tetap seperti saat ini, dengan asumsi "pandai-pandaiilah" mencari tambahan dengan cara menghilangkan kalimat sumpah jabatan tentang penerimaan pemberian oleh pihak lain.

Masalah kewajiban gratifikasi ke KPK, itu soal "mudah"? Bukankah ada oknum pejabat yang tidak melaporkan kekayaan kepada KPK juga tidak diberikan sanksi apa-apa? Dan, untuk persyaratan mencalonkan diri menjadi kepala daerah juga cukup hanya ada stempel penerimaan laporan dari KPK. Sama sekali KPK "tidak sempat" memeriksa kebenaran harta yang dilaporkan. Setelah bertambah, juga tidak pernah dicek apakah harta yang bertambah ada bukti pembayaran pajak penghasilannya. Lagi pula masih banyak PNS yang tidak memiliki NPWP juga.

Jadi yang paling aman bagi yang memang hobi korupsi adalah tetap seperti saat ini dan hilangkan kalimat yang "mengganggu nurani" dalam sumpah jabatan tadi, daripada harus naik gaji dengan berlakunya UU pembuktian terbalik dan konflik kepentingan bagi pengusaha yang jadi penguasa.

Bagaimana dengan sumpah jabatan di



hadapan Allah Yang Maha Mengetahui? Mungkin bagi oknum pejabat publik atau PNS yang hobi korupsi, tetapi munafik dengan bersumpah di hadapan para rohaniawan, adalah orang-orang yang berpikir sumpah jabatan yang mereka lakukan hanyalah sumpah jabatan dengan Allah yang pikun?

Padahal, idealnya, bagi siapapun yang mau jadi pejabat publik di Indonesia,

dikala krisis multidimensi seperti ini, haruslah orang yang berani keluar dari zona nyaman (dari kecukupan ekonomi dan kemapanan status) untuk menjadi "pahlawan revolusi" agar proses reformasi ini bisa terlaksana dengan baik, tanpa akhirnya dibajak oleh mantan-mantan koruptor karena para tokoh yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) tidak mau keluar dari zona nyaman.



09

BANGSA INDONESIA SEMAKIN MISKIN



Bersama cucu dan kakek di rumah peninggalannya yang masih di buat seni ryanis serupa dengan tampilan orisinal.



mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Selain itu mencakup gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan itu sendiri banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat

dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Juga penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

Tapi, ada juga penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Dan, penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Kemiskinan memang merupakan masalah global. Persoalan ini sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif

dan komparatif. Sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Dan, yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini



① ② ③ Sosok yang selalu penuh perhatian terhadap kehidupan rakyat kecil di manapun ia berada.

AGENSI, PENYEBAB KEMISKINAN

Indonesia merupakan salah satu yang tergolong miskin. Bahkan, terlepas dari pro dan kontra, saya melihat Indonesia semakin lama justru semakin miskin. Dan, ironisnya lagi, penyebab agensi menurut hemat saya adalah penyebab utama.

Jika sistem pemerintahan yang seperti saat ini dipertahankan, artinya sistem yang pintar membuat undang-undang dan peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya ada undang-undang atau peraturan yang sengaja tidak dibuat, sehingga pelanggaran atau penyimpangan terus terjadi, jelas peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah ada menjadi tidak berguna untuk menyejahterakan rakyat. Inilah yang membuat Indonesia semakin lama semakin miskin!

Pemerintah memang telah mencanangkan pengurangan kemiskinan dengan berbagai cara. Dari bantuan langsung tunai, bantuan pinjaman dari sistem bergulir tanpa bunga sampai ke bunga ringan tanpa agunan (dengan harapan akan menguatkan struktur permodalan bahkan menciptakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang baru).

Namun, fakta menunjukkan bahwa Indonesia hingga kini masih masuk dalam jajaran negara miskin di dunia.



Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menerapkan penghasilan US\$ 2 per hari sebagai standar untuk mengukur kemiskinan. Jika mengacu kepada standar ini, maka rakyat Indonesia bisa dikategorikan lebih dari 50% yang berada dalam kemiskinan.

Berdebat mengenai angka-angka kemiskinan tidak akan mengurangi kemiskinan. Meski soal jumlah orang miskin ini sempat menjadi isu hangat bagi orang-orang "orde baru" yang mau menjadi presiden. Menurut saya, akan lebih baik menelaah kemiskinan secara mendalam guna menemukan solusi yang efektif dijalankan dalam kerangka menyejahterakan rakyat.

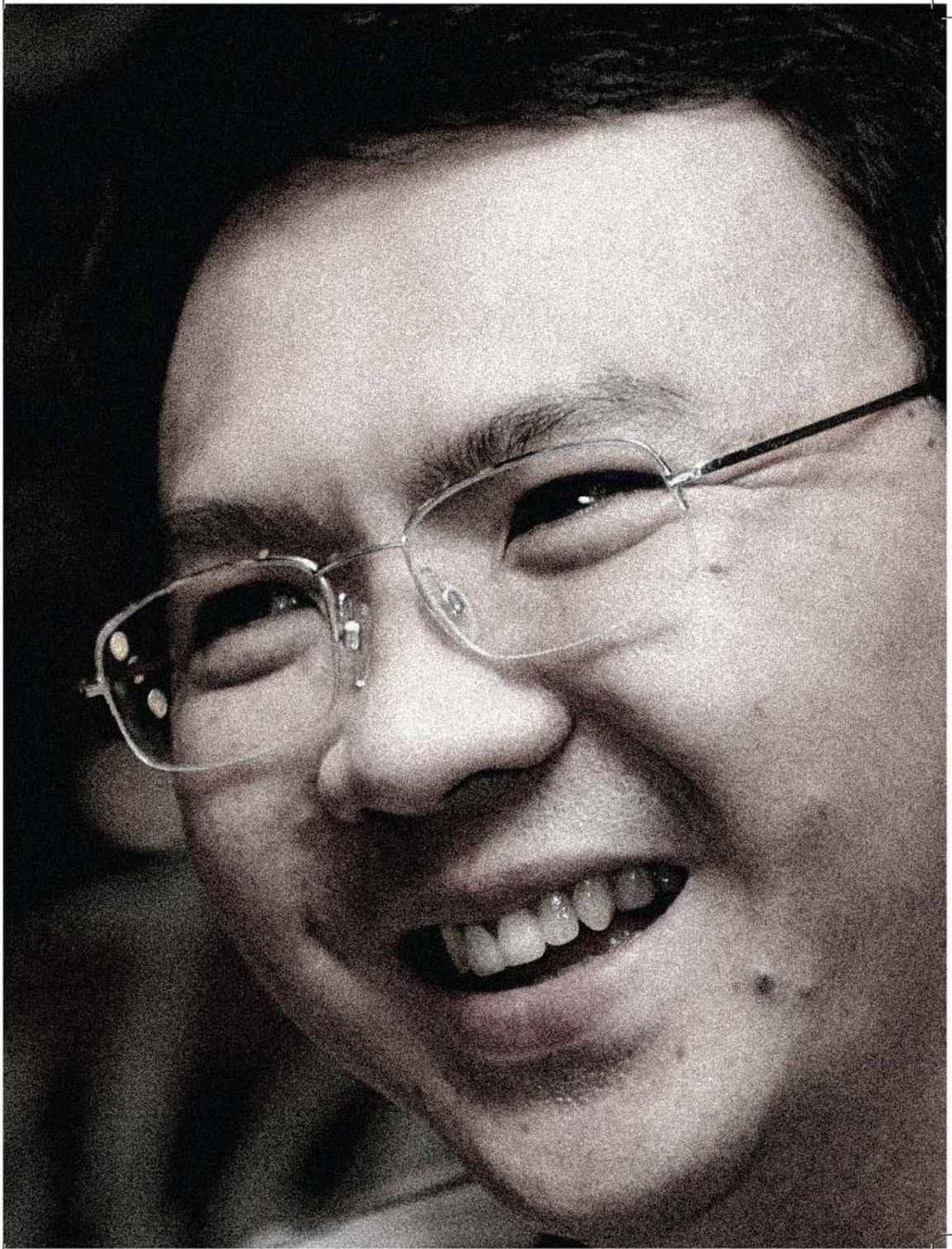
Kembali kepada standar kemiskinan versi PBB tersebut, apakah dengan memiliki penghasilan yang mencapai

US\$2/hari, penduduk Indonesia sudah sejahtera? Tidak. Bahkan, seandainya 100% penduduk Indonesia berpenghasilan mencapai US\$2/hari, bangsa ini tetap terancam semakin lama semakin miskin.

Kenapa? Pada tahun 2006, ketika selaku Bupati Belitang Timur akan menentukan upah minimum bagi pekerja di Kabupaten Belitang Timur, saya tentu saja melihat hasil survei di bulan oktober 2005 mengenai komponen kehidupan hidup layak bagi seorang lajang di Kabupaten Belitang Timur.

Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa dibutuhkan minimum penghasilan Rp782.495,44 /bulan untuk hidup layak bagi seorang lajang. Tetapi dalam perundingan tripartit antara pengusaha, pemerintah dan buruh disepakati di bawah nilai tersebut, dan kami membuat surat ke gubernur untuk membuat surat keputusannya.









Bela benihikan pertama di Bangka Belitung dibuat dengan memanfaatkan aliran air dari gunung.

KEMISKINAN BERKESINAMBUNGAN

Inilah dilema bangsa kita. Satu pihak, jumlah di atas sudah minimum, tapi *to/i* masih tetap dikurangi lagi. Jika dipaksakan, banyak juga pengusaha yang akan bangkrut, karena tidak semua buruh memiliki kemampuan kerja yang sebanding dengan upah minimum yang dibutuhkan. Antara penghasilan dengan pendidikan sangat berhubungan erat.

Tapi bagaimana bisa seseorang yang dalam komponen kehidupan yang disurvei untuk pendidikan hanya dialokasikan Rp2.222,22,-/bulan? Untuk membeli 1 koran saja tidak cukup. Bagaimana bisa mengambil kursus ketrampilan untuk meningkatkan daya saingnya.

Tentu saja ada juga yang beruntung bisa menerima pelatihan di perusahaan yang memang terkategori besar dan "baik hati" karena mau membagikan keuntungannya untuk meningkatkan ketrampilan buruhnya). Tapi, jumlah yang seperti ini amat sedikit.

Contoh jumlah dan biaya Komponen kehidupan hidup layak bagi seorang lajang yang disurvei di bulan oktober 2005 di atas adalah komponen:

1. Makanan dan minuman (Rp322.019,15)
2. Sandang (Rp70.750,00,-)
3. Perumahan (Rp274.548,61,-)
4. Pendidikan (Rp.2.222,22,-)
5. Kesehatan (Rp.27.750,01,-)
6. Transportasi (Rp.89.999,90,-)
7. Rekreasi dan tabungan (Rp.14.761,10,-)

Jika diasumsikan semua lajang yang ada di Indonesia berpenghasilan sesuai dengan hasil survei komponen di atas, artinya semua berpenghasilan di atas US\$2/hari, bukankah sudah tidak miskin lagi. Jawabnya tentu saja iya.

Namun harus diingat, sangat rentan untuk jadi miskin kembali. Paling tidak, tak mungkin menjadi bangsa yang kuat dan kaya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki jaminan pendidikan (hanya mampu Rp2.222,22/bulan) dan kesehatan (hanya punya Rp27.750,01,-). Itupun

bukan untuk beli asuransi kesehatan atau biaya berobat, tetapi komponen kesehatan yang disurvei adalah untuk biaya untuk keperluan mandi, obat nyamuk, dan cukur rambut. Dengan demikian, artinya seorang lajang di Indonesia tidak boleh tidak sehat dan tidak bisa menambah keterampilan.

Lantas bagaimana dengan yang sudah tidak mampu bekerja lagi? Jika yang usia pensiun sakit dari mana biayanya? Dengan komponen tabungan yang hanya Rp14.761,10,-/bulan, tidak mungkin seorang lajang mampu memiliki jaminan hari tua yang mampung menopang hidupnya. Artinya, jika sang pensiunan ini sakit, maka anaknya yang tidak memiliki komponen untuk berobat yang harus menanggungnya, tentu saja harus hutang ke majikannya atau rentenir. Jika petani, ke tengkulaknya.

Hal ini juga berlaku bagi pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan kredit tanpa bunga sampai yang lunak tanpa agunan. Apa yang terjadi? Seorang pengusaha UMKM yang memiliki modal kerja di bawah Rp100 juta, akan jadi bangkrut karena ada anggota keluarganya yang jatuh sakit mengalami tindakan operasi sampai masuk unit perawatan insentif (ICU). Misalnya, seorang pedagang warung akan bangkrut jika istrinya dalam melahirkan harus dengan tindakan *Caesar*. Sebab, biaya bisa mencapai Rp8 juta di kelas III. Sementara jaminan Askeskin tidak bisa berlaku untuk pengusaha warung ini. Apalagi bagi karyawan/buruh di perusahaan.

Dengan demikian kita menghabiskan banyak modal usaha UMKM karena sakit, sekaligus banyak memiskinkan para buruh karena sakit. Baik untuk dirinya sendiri, maupun orangtuanya yang sudah berusia lanjut.

Mungkin ada yang mempertanyakan, bukankah ada Jamsostek? Jamsostek tidak mengakomodir semua. Bahkan pengusaha UMKM sama sekali tidak bisa dicover oleh Jamsostek. Itulah yang dikatakan sistim sudah ada, seperti UU No 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, namun dalam pelaksanaannya belum dinikmati oleh rakyat.

Bukan sebaliknya, semakin lama yang semakin kaya hanyalah pejabat dan mantan pejabat.

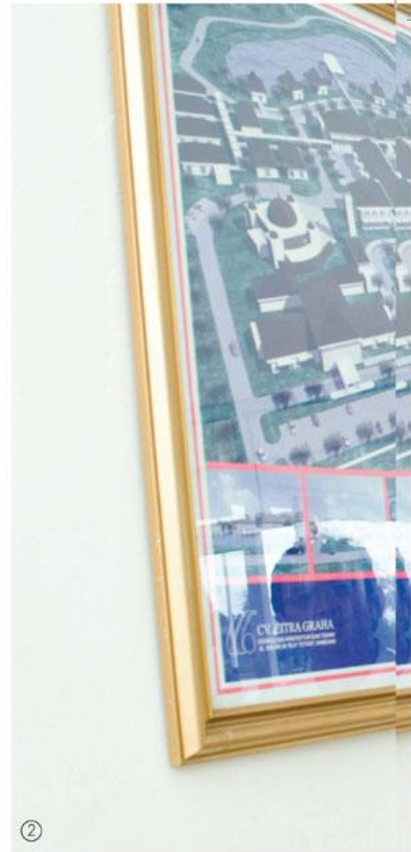
PENTINGNYA ASURANSI KESEHATAN

Untuk itu, pemerintah yang harus berinisiatif melaksanakan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat. Pihak swasta tidak bersedia menanggung yang berusia 65 tahun ke atas, kecuali dengan premi sangat khusus dan mahal. Dengan asuransi PT Askes, sesuai dengan amanat UU No 40, harusnya seluruh rakyat bisa mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dengan hanya membayar Rp7500/bulan/orang. Yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.

Terkait pendidikan, semua warga juga harus dibebaskan dari biaya SPP dan buku-buku pelajaran dapat dipinjamkan oleh sekolah. Bagi yang tidak mampu, pemerintah semestinya memberikan tunjangan transportasi.

Dengan adanya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat, maka bangsa ini semakin lama tidak akan semakin jatuh miskin. Sebaliknya, akan semakin kaya, dengan syarat jaminan hari tua sebagaimana yang terdapat pada UU No 40 Tentang Jaminan Sosial Nasional dijalankan. Setiap orangtua yang meninggal, akan mewariskan modal kepada generasi berikutnya.

Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup melaksanakan ini semua dengan kondisi keuangan negara yang ada? Menurut saya sanggup. Asal para pejabat di negeri ini berani ramai-ramai mengeluarkan UU Pembuktian Terbalik soal harta kekayaannya dan keluarganya. Jika UU ini diberlakukan, maka semakin lama rakyat Indonesia akan semakin kaya. Bukan sebaliknya, semakin lama yang semakin kaya hanyalah pejabat dan mantan pejabat. Ini didukung kenyataan bahwa sulit membuktikan asal usul kekayaannya para pejabat. Jadi tetap harus lakukan gratifikasi. Ada yang mau?



②



①

① ② ③ Meninjau rumah sakit yang dibuat dengan mendahulukan kepentingan rakyat kecil.





10 KESURUPAN ROH ARWAH KOLONIALISME

Menurut Anda, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia paskareformasi?

Demokrasi telah dibajak oleh elite-elite pro status quo. Secara sistim sangat baik.

Maksud Anda?

Artinya telah ada pemilihan kepala daerah, bahkan presiden secara langsung. Rakyat telah berkesempatan untuk memilih sendiri pemimpinnya. Sayangnya, banyak oknum elite yang kesurupan roh-roh/arwah-arwah kolonialisme dengan politik *divide et impera*-nya, dengan melakukan kampanye dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) menggunakan unsur SARA (suku agama ras dan antargolongan). Bukan mengemukakan unsur BTP (Bersih, Transparan, Profesional).

Imbasnya?

Hasil demokrasi kita hanya mendapatkan "bad of the worst" (buruk dari yang terburuk). Bukan *best of the good*. Apalagi *best of the best*. Perkembangan demokrasi kita bukan yang berlaku universal. Inilah yang menyebabkan kenapa demokrasi yang kita miliki tidak meningkatkan jumlah investasi luar negeri, jelas demokrasi yang bukan Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI), melainkan demokrasi ala bangsa *Indon* (jadi bukan Indonesia, hanya terdiri dari suku, agama dan ras tertentu saja). Mungkin ini juga yang menyebabkan sebagian orang Malaysia dengan penduduk kecil berani *meledak* kita bangsa *Indon*, karena memang demokrasi pascareformasi justru membuat kita tidak menjadi bangsa Indonesia yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

Apakah perkembangan demokrasi tersebut sejauh ini sudah bermakna

bagi kesejahteraan masyarakat secara umum?

Jelas belum, jika iya harus kita ukur melalui ukuran standar PBB melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HDInya).

Jika belum, apakah Anda memiliki data sebagai indikator?

Lihat saja indikator IPM/HDI Indonesia yang terus melorot ke belakang. Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara

tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704).

Lantas apa yang salah atau kekurangan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia?

UU Pemerintahan Daerah termasuk Pemilu dan Pilkada-nya yang "sengaja" dikebiri. Misalnya, kenapa setiap calon kepala daerah atau presiden tidak diberlakukan UU Pembuktian Terbalik akan harta kekayaannya. Jika ini diberlakukan, semua mantan koruptor tidak berani mencalonkan diri. Termasuk pengusaha yang mengemplang pajak,



maupun harta kekayaan negara lainnya. Kesalahannya memang terletak di DPR RI yang dengan sengaja tidak membuat UU Pembuktian Terbalik bagi seluruh rakyat yang mau menjadi pejabat publik.

Apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut?

Para tokoh idealis tulus (bukan yang munafik, rasialis) harus berani tampil mencalonkan diri di pemilu untuk mengisi kursi di DPR dan DPRD, sekaligus berani melawan dan bersuara jika lihat rekannya "maling" *nilep* uang negara dalam bentuk foya-foya di anggaran perjalanan dinas dan studi banding yang tidak ada manfaatnya. Cara lain, melalui pembuatan UU Pemilu yang mengizinkan adanya partai lokal di setiap propinsi. Ini untuk memberi tekanan maupun perubahan akan partai di tingkat nasional yang tidak mau berubah.

Dari beberapa perbaikan yang Anda sampaikan, mana menurut Anda yang menjadi skala prioritas? Dan, kenapa?

Adanya partai lokal. Dengan demikian, untuk melawan partai nasional yang arogan tidak mau melahirkan UU Pembuktian Terbalik bagi harta para calon pejabat, mantan pejabat dan pejabat bisa dikalahkan di tingkat propinsi, yang pada akhirnya partai-partai lokal di tiap propinsi yang telah diisi oleh para tokoh-tokoh BTP yang idealis bisa

bergabung menjadi partai nasional yang akan melahirkan UU yang komplit untuk menjerahatkan rakyat dengan cara mengantisipasi Pilpres dan Pilkada diikuti oleh tokoh-tokoh BTP yang tidak memiliki catatan/hubungan dengan masa lalu yang terbukti korup.

Siapa saja yang harus terlibat dalam memperbaiki kekurangan dalam pembangunan demokrasi tersebut?

Para aktivis yang idealis dengan predikat BTP yang memiliki penghasilan cukup dan pendidikan di atas D3 atau S1 harus menyediakan diri menjadi anggota DPR dan DPRD, untuk membuktikan dirinya, setelah itu mencalonkan diri di Pilkada dan Pilpres.

Jika kekurangan tersebut tidak segera diperbaiki, apakah menurut Anda ada yang pihak yang diuntungkan?

Pasti, para koruptor, mantan koruptor dan pengkhianat negara dengan menjual unsur suku dan agama yang akan diuntungkan, yang pada akhirnya hancurlah bangsa ini. Bayangkan, di tahun 2007 saja. Indonesia berada pada rangking 145 terkorup dari 180 negara .

Kalau ada kenapa mereka diuntungkan?

Karena rakyat dibuat tidak ada pilihan dalam setiap Pemilu, Pilkada maupun

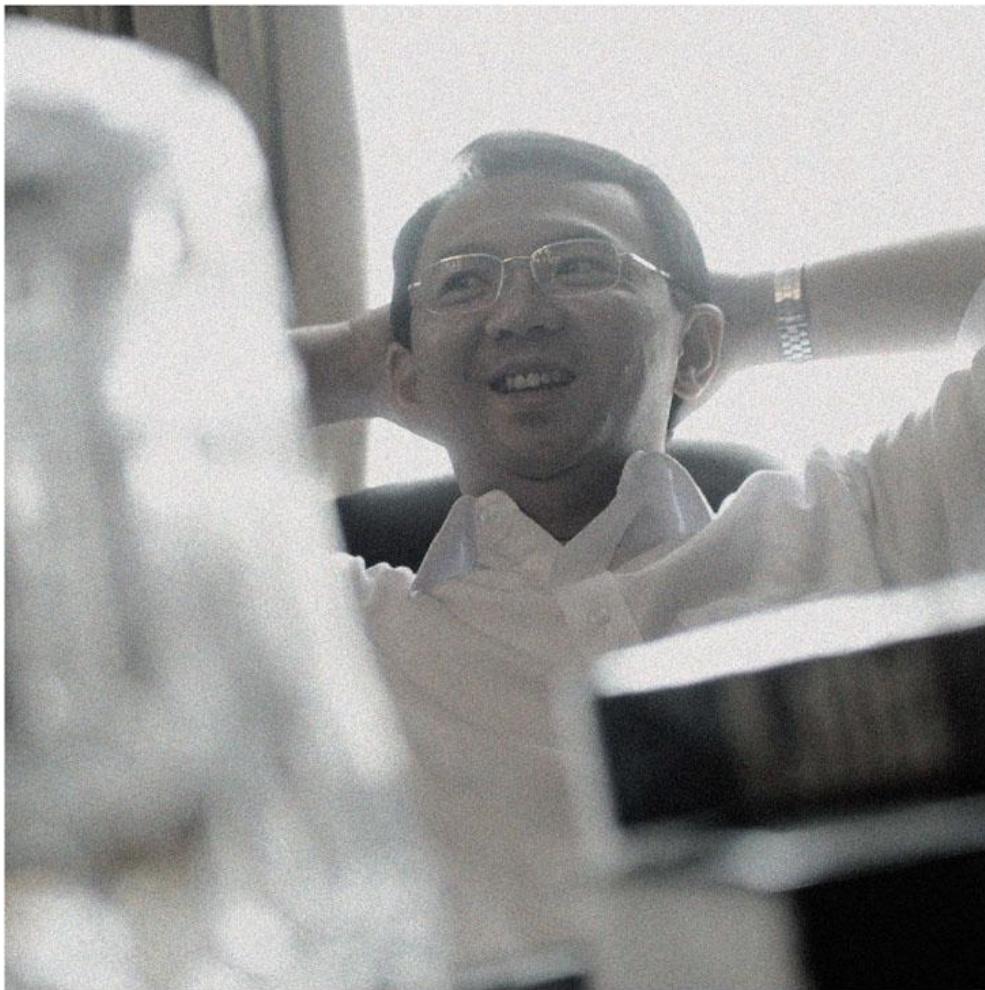


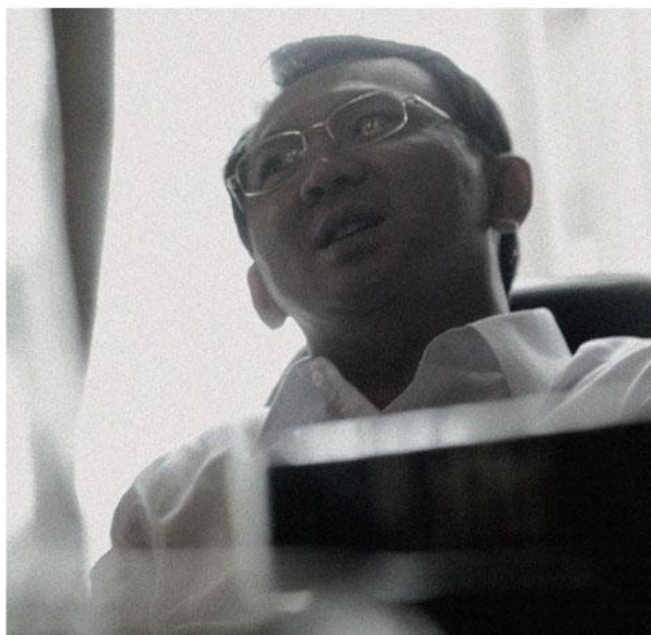
① Berbincang-bincang di pos keamanan dalam areal pabrik milik keluarga.
② Rumah dinas saat menjabat sebagai bupati Belitang Timur.





{ Kita harus berani keluar
tinggalkan zona nyaman }





Pilpres. Rakyat "dipaksa" memilih yang buruk dari yang terburuk. Sedangkan yang mengerti dibuat menjadi golput, yang justru menaikkan persentase jumlah pemilih para calon yang terburuk tadi.

Jika ada pihak yang diuntungkan, berarti harus ada goodwill dari pihak yang diuntungkan tersebut untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Menurut Anda, apakah goodwill itu akan ada?

Tidak akan pernah ada. Selama rakyat yang idealis tidak berani melawan, atau dengan kata lain diijinkannya partai lokal dengan tokoh-tokoh BTP di tiap daerah muncul.

Menurut prediksi Anda, jika langkah tersebut dilakukan, berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu untuk memperbaiki kekurangan dalam pembangunan demokrasi yang menjadi skala prioritas tersebut?

Jika Pemilu 2009, para tokoh-tokoh BTP berani muncul mencalonkan diri melalui partai yang ada di seluruh kecamatan, maka pada Pilkada tahun 2010, kita telah bisa melihat para tokoh-tokoh BTP yang telah duduk di DPR dan DPRD (sekaligus terbukti karakter dan perilaku BTP-nya sewaktu menjadi anggota DPR/DPRD) bisa ikut Pilkada. Jika mereka menang, pastilah kesejahteraan rakyat akan meningkat. Demikian juga di DPR mereka akan menyerukan pengesahan UU pembuktian terbalik akan harta pejabatnya.

Selain waktu, perbaikan atas kekurangan dalam pembangunan demokrasi tersebut tentu juga membutuhkan dana? Bagaimana komentar Anda tentang hal ini?

Itulah yang saya katakan di awal tadi. Kita butuh BTP yang perpenghasilan cukup. Artinya sekedar cukup untuk dia kampanye di tingkat kecamatan, maupun di Pilkada. Dengan kerelaan hati seperti para pahlawan revolusi mengusir kolonialisme penjajah dengan tanpa pamrih, saat ini kita juga seperti pahlawan revolusi dulu. Bedanya, sekarang kita harus berani keluar tinggalkan zona nyaman, mengorbankan uang, tanpa meminta balik modal demi mengusir para oknum elite politik yang telah dirasukinya para penjajah kolonialisme.

Di banding negara tetangga, bagaimana Anda melihat pembangunan demokrasi di Indonesia?

Cukup baik, dan tidak kalah dengan negara tetangga. Bedanya, yang di negara tetangga masih ada rasa malunya jika korupsi. Kalau kita sudah tidak malu lagi. Sudah jelas dari mana duitnya, waktu jadi pejabat gaji kecil dengan disumpah tidak boleh terima apapun juga dari siapapun juga. Nyatanya, begitu pensiun, kayanya bukan main. Tapi, tentu saja tidak semua. Ini hanyalah "oknum" pejabat. Namun jika hampir semua, apa itu disebut oknum juga? Saya yakin, ahli bahasa pun bingung!

Bagaimana dampak peta demokrasi di Indonesia saat ini dalam hubungan antarnegara, termasuk di dalam bidang politik dan ekonomi?

Jika tidak segera diperbaiki, maka demokrasi kita justru akan menyeret rakyat semakin sengsara. Sebab, dunia ini sudah tanpa batas dengan perdagangan globalnya yang bebas. Jika demokrasi kita tidak bisa diperbaiki dari yang model sekarang (mengedepankan unsur SARA dalam setiap pesta demokrasinya) maka, semakin hilanglah investor dari negeri ini. Dan, negeri tetangga terus menikmati peningkatan ekonomi, karena sistim yang mereka jalankan tidak mendidik rakyat menjadi rasialis terhadap bangsa di luar suku, agama maupun ras-nya, sekalipun demokrasinya juga masih bermasalah.





11

MEREKRUT CALON KEPALA DAERAH

Siapa yang pantas untuk didukung menjadi kepala daerah dalam pilkada langsung? Pertanyaan ini menjadi tidak relevan jika kita menjawab siapa saja yang mau, asal dia bersih, transparan dan profesional (BTP). Persoalannya dari mana kita tahu dia BTP jika belum

terbukti menjadi pejabat publik? Jika semua calon kepala daerah harus pernah menjadi pejabat publik, apakah kita yakin bisa mendapatkan pejabat publik yang terbukti BTP pada saat ini?

Pengertian BTP bukan hanya Bersih, Transparan dan Profesional bagi dirinya, tetapi juga harus berani membongkar dan melawan segala bentuk KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) di dalam sistem pemerintahan dimana dia ditempatkan.

Jika pengertian BTP di atas kita terapkan dan ternyata tidak ditemukan calon yang BTP, dari mana kita merekrutnya? Hal yang paling ideal untuk merekrut calon kepala daerah adalah melalui dewan perwakilan rakyat (baik daerah maupun pusat), kenapa? Ketika seseorang ditempatkan di DPRD / DPR, maka segala urusan mengenai perencanaan dan pengawasan dari anggaran yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat dimulai. Apa yang terjadi didalam perencanaan anggaran

dapat menggambarkan bagaimana kondisi anggota dewan yang terhormat tersebut didalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau dirinya sendiri. Jika seorang yang BTP ditempatkan di sana, pastilah ia akan melawan dan menyuarakan

keluar apa yang terjadi di dalam proses perencanaan dan pengawasan APBN atau APBD di dalam mensejahterakan rakyat, sekalipun seorang BTP

menjadi super minoritas di dalamnya, BTP akan tetap menyuarakan kebenaran dan melawan segala kejahatan yang terjadi (*prophetic voices*).

Inilah kondisi ideal dalam merekrut calon kepala daerah, kita akan merekrut BTP yang berada di dalam DPRD/DPR. Seorang BTP dari DPRD/DPR akan sangat menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan suka melakukannya jika ia duduk di eksekutif.







① Di depan tempat hio berpose bersama gambar mendiang kakek.
② Di rumah peninggalan kakek dengan foto dari seluruh keluarga besar.



DIPILIH RAKYAT

Jika kondisi ideal diatas tidak ditemukan, siapa yang akan direkrut? yang paling mudah adalah merekrut tokoh "BTP" dari tokoh masyarakat maupun pejabat /mantan pejabat di lingkungan PNS/ BUMN - TNI/ Polri / Jaksa! Jika kondisi ideal di atas diterapkan, apakah kita akan mendapatkan yang BTP? jika ada, kita juga akan menghadapi kendala apa yang akan terjadi pada seorang tokoh "BTP" di masyarakat yang belum pernah di pemerintahan? masalah profesionalismenya tidak perlu kita perdebatkan jika sang tokoh "BTP" bersarjana S-1 apalagi S3, persoalannya apakah karakter BTP-nya telah terbukti? Apa yang akan terjadi padanya jika ia menjadi seorang pejabat publik dengan berbagai fasilitas dan godaan akan tahta, harta dan wanita? Hal ini tidak ada seorangpun bisa menjamin, karena sang tokoh "BTP" belum pernah terbukti di posisi pejabat publik.

Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan calon kepala daerah yang BTP, jika kondisi di atas juga tidak menjamin mendapatkan BTP untuk didukung dalam pilkada langsung?

Kalau kondisi tidak bisa menunggu,

kita tetap calonkan "BTP" dari tokoh masyarakat untuk menjadi kepala daerah dengan asumsi mungkin ya / mungkin tidak calon tersebut jika terpilih akan menunjukkan dia sebagai seorang yang BTP. (lebih baik dari pada memilih calon yang sudah duduk di pemerintahan tetapi sudah jelas tidak BTP).

Jika tokoh "BTP" dari masyarakat ini kita calonkan, pertanyaannya menjadi: Bagaimana menjual "BTP" sebagai calon kepala daerah di mata rakyat banyak? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat? Setelah mengalami pemilu dua kali pasca reformasi dan pengalaman baik langsung

maupun tidak langsung pilkadal sejak 2005, rakyat telah menjadi semakin cerdas dan kritis dalam menilai seorang yang mengharapkan dukungannya untuk mendapatkan kursi pejabat publik.

Jika asumsi di atas benar, apakah ada manfaatnya untuk mendapatkan suara rakyat dengan melakukan kegiatan sosial? Yang dibutuhkan bukan suaranya saja, tetapi bagaimana mendapatkan juga hatinya rakyat, jika hanya suara dengan kegiatan sosial, bagaimana jika calon yang lain juga melakukan kegiatan sosial? Mudah saja, kita lakukan lebih banyak dan lebih mahal nilainya. Jika demikian, apakah saudara masih percaya tokoh masyarakat yang mau kita calonkan itu "BTP" yang akan jadi BTP jika terpilih? Baru mau mendapatkan suara rakyat sudah dengan cara merusak hati rakyat.

Pilkada langsung dan Pemilu harus menghasilkan rakyat yang semakin cerdas dan kritis dalam menentukan pilihan berdasarkan akal sehat, dengan memilih yang paling BTP bukan yang paling se-SARA apalagi yang paling banyak memberi materi pada saat ada maunya.

Kondisi rakyat yang semakin cerdas dan kritis juga berakibat semakin hilangnya kepercayaan rakyat kepada elite politik maupun partai politik, termasuk siapapun yang mau menjadi elite politik apalagi jabatan kepala daerah. Asumsi kebanyakan rakyat siapapun yang jadi, pasti tidak akan mensejahterakan mereka, yang disejahterakan lebih dulu pasti dirinya dan partai politiknya.

Yang dibutuhkan bukan suaranya saja, tetapi bagaimana mendapatkan juga hatinya rakyat.



CALON INDEPENDEN

Jika sedemikian pesimisnya mendapatkan calon kepala daerah yang BTP, apa yang harus dilakukan? Jika kita berpegang pada keyakinan pertama bahwa calon kepala daerah yang akan direkrut harus teruji lebih dulu sebagai pejabat publik, maka untuk merekrut kepala daerah tingkat I harus dari bupati/walikota yang sudah teruji sebagai tokoh BTP. Lalu untuk merekrut kepala daerah tingkat II, kita rekrut dari anggota DPRD / DPR yang sudah terbukti sebagai tokoh BTP.

Bagaimana menghasilkan anggota

DPRD/DPR yang BTP jika partai politik yang mengusungnya tidak BTP? Semua harus berawal dari adanya pemuda/tokoh-tokoh masyarakat "BTP" di masyarakat yang telah terbukti mendapat predikat AHOK (Anda Harapan Orang Kecil) di mata rakyat dan mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD/DPR pada saat pemilu.

Bagaimana jika "BTP" yang terpilih mendapatkan perlawanan dari rekan-rekannya di DPRD/DPR dan direcall oleh partainya yang tidak BTP. Jangan kuatir, justru inilah calon yang paling dinantikan oleh kebanyakan rakyat menjadi

kepala daerahnya.

Bagaimana jika seluruh partai politik tidak menyediakan partainya menjadi kendaraan dalam pencalonan. Hal inipun jangan kuatir, karena banyaknya partai yang tidak ingin ketinggalan kereta dalam hal "pesta" pencalonan kepala daerah. Jika ternyata partai-partai tetap memboikot sang BTP, bersyukurlah dengan adanya calon independen dalam pilkada langsung.

Apa yang akan terjadi jika BTP yang terpilih harus menghadapi DPRD yang tidak sejalan dengannya. Sama sekali tidak ada yang dikuatirkan, rakyat akan



mendukungnya dalam pemilu akan datang dengan memilih partai-partai yang mendukung BTP. Jika tidak ditemukan? Di sinilah diperlukan adanya partai lokal untuk mendukung BTP mewujudkan visinya dalam mensejahterakan rakyat dalam bingkai NKRI yang BERBHINNEKA TUNGGAL IKA yang PANCASILAIS dengan UUD '45 sebagai landasannya dalam mensejahterakan rakyat.

Dengan demikian Anda yang menjadi harapan orang kecil (AHOK), mari kita mencalonkan diri sebagai anggota DPRD/ DPR pada pemilu yang akan datang.



12

MENGHAPUS PRAKTIK CURANG

Saat ini, Anda mengatakan aktif menjalankan roda Center for Democracy and Transparency 31 (CDT 31). Bisa Anda gambarkan sekilas mengenai lembaga yang Anda dirikan tersebut?

Center for Democracy and Transparency 31 adalah lembaga kajian dan riset opini publik terutama yang terkait dengan pemilihan umum di tingkat nasional dan khususnya pemilihan di daerah-daerah.

Apakah CDT 31 sama dengan lembaga riset lainnya?

Tidak. CDT 31 berbeda dengan lembaga riset lainnya. CDT 31 menempatkan lembaga ini sebagai agen atau promotor yang terlibat secara aktif dalam mempromosikan munculnya individu-individu yang bersih, transparan dan profesional, untuk menjadi kandidat pemimpin yang tidak hanya berani dan vocal, tetapi juga mempunyai kemampuan dalam mempromosikan kinerja kepemimpinannya sekaligus melengkapinya dengan perangkat metodologis ilmiah yang akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya.

Konkritnya, bagaimana posisi lembaga ini?

CDT 31 menitikberatkan perannya dalam dua hal. Yang pertama, CDT 31 mendorong calon-calon pemimpin di daerah untuk meninggalkan praktik-praktik politik uang dan penggunaan kekuasaan dalam meraih dukungan masyarakat. Sebaliknya, CDT 31 mendorong kandidat calon pemimpin agar secara dini menjadi lebih apresiatif dan responsif terhadap karakteristik, persepsi dan aspirasi masyarakat yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan-kebijakan apa saja yang dibutuhkan kelak jika mereka terpilih menjadi pemimpin. Yang kedua, CDT 31 ingin memperkaya wawasan dan opini publik/masyarakat terhadap figur-figur seperti apa yang ideal



untuk menjadi pemimpin mereka. Tentu saja dengan memberikan promosi terhadap kandidat-kandidat yang mempunyai kualitas yang dalam pandangan CDT 31 akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang akan memilihnya.

Bagaimana pula cara CDT 31 dalam upaya mempromosikan calon-calon pemimpin tersebut?

CDT 31 berpartisipasi aktif mempengaruhi opini publik melalui cara-cara yang sehat, etis dan memberikan politik kepada publik. Kami juga membantu mereka dalam proses penggalangan dana, terutama jika calon-calon yang bersangkutan tidak didukung oleh kemampuan finansial yang memadai.

Bisa dirinci visi CDT 31?

Visinya mewujudkan tokoh yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) menjadi pejabat publik melalui pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada). Sedangkan misinya mendidik rakyat pemilih dalam pilkada berdasarkan unsur BTP bukan unsur SARA (primordialisme), mencari dan memotivasi tokoh-tokoh BTP untuk maju sebagai calon dalam Pilkada dan menggalang dana untuk mendukung tokoh-tokoh BTP untuk menang di dalam pemilihan kepala daerah langsung sekaligus mendidik rakyat dalam berdemokrasi yang berakal sehat.



Terus mencari dan memotivasi
pemuda-pemuda idealis,
terdidik dan mampu ekonomi
untuk tidak apatis

Apakah memang Anda sudah memutuskan ikut melakukan perubahan hanya melalui lembaga tersebut?

Tentu saja tidak. CDT 3.1 hanyalah salah satu bagian perjuangan yang saya lakukan.

Bagaimana kiat Anda untuk melebarkan sayap CDT 31 sehingga bisa operasional secara nasional?

Kami tidak berpikir untuk punya cabang operasional di seluruh Indonesia, tetapi bagaimana CDT3.1 bisa mendidik rakyat di seluruh Indonesia dalam Pilkada tidak memilih berdasarkan SARA, tetapi berdasarkan BTP. CDT 3.1 juga akan terus

mencari dan memotivasi pemuda-pemuda idealis, terdidik dan mampu ekonomi untuk tidak jadi apatis, tetapi mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di Tingkat II dan I melalui partai politik yang berhaluan nasionalis di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini, bagaimana perkembangan CDT 31?

Kami sedang menyiapkan penerbitan buku, kunjungan-kunjungan ke daerah dan penyelenggaraan seminar atau *talkshow*. Sejauh ini telah dilakukan beberapa *polling* dan dukungan calon-calon kepala daerah yang kami telah kenal.

Gerak langkah Anda melalui CDT 31 tampaknya akan menghadapi banyak kendala, mengingat konsep CDT 31 melahirkan pemimpin yang BTP, sementara kenyataan yang ada, pengambil keputusan masih dimonopoli orang-orang yang tidak BTP. Apakah Anda sudah siap menghadapi segala konsekuensinya?

Sudah sejak awal CDT31 dilahirkan memang untuk melawan sistim *status quo* yang ingin mempertahankan orang-orang yang tidak BTP.

Dalam Pilgub Sumatera Utara yang baru lalu, Anda juga secara gencar mengkampanyekan pemilihan gubernur yang BTP. Apakah di wilayah lain juga Anda melakukan hal serupa, terkait dengan keinginan Anda untuk merubah Indonesia dari kondisi yang ada saat ini?

Tidak, hanya di Sumatera Utara (Sumut), karena Sumut sangat heterogen dan dapat

dikatakan seperti miniatur Indonesia disamping hampir semua partai politik dan instansi memiliki orang yang berasal dari Sumut.

Jika melakukan hal yang sama, contohnya di daerah mana dan hasilnya bagaimana?

Daerah lain yang akan dilakukan adalah di Bangka Belitung mengingat ada 3 Pilkada yang akan berlangsung dalam tahun ini.

Selain melalui CDT 31, cara apa lagi yang Anda tempuh untuk ikut merubah Indonesia dari kondisi yang ada saat ini?

Menjalankan yayasan untuk membantu rakyat secara langsung, terutama membantu rakyat miskin yang merasa telah dilupakan dan hilang harapan/kepercayaan kepada pemimpinnya untuk mencapai impian mereka.

Anda termasuk getol menyuarakan perlunya keberadaan partai lokal, namun dalam visi dan misi CDT 31, hal itu kurang jelas terlihat sebagai bagian dari perjuangan lembaga yang Anda dirikan itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Atau Anda memiliki jalur yang lain untuk memperjuangkan hal tersebut?

Partai lokal harus diperjuangkan oleh kaum BTP yang merasa dirugikan karena tidak bisa mendirikan partai lokal di propinsinya, kami hanya akan membantu advokasi/pengacara jika ada yang mengajukan ke MK.

Pemilu dan Pilpres 2009 tak terlalu lama lagi. Apa target CDT 31 untuk itu?

Targetnya ada paling sedikit 10 % tokoh-tokoh BTP duduk di seluruh DPRD kabupaten kota di Indonesia

Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga tersebut?

Kami sedang merekrut SDM yang memiliki visi dan misi yang sama, tentu saja yang siap berkorban untuk mewujudkan Indonesia, yang demokratis, transparan dan berkemajemukan.







13

KARIR TERBAIK UNTUK KAUM IDEALIS

perjalanan keliling Indonesia dengan fasilitas tidur dan sarapan, makan siang, makan malam di hotel mewah, frekuensi naik pesawat terbang menyamai rakyat biasa naik taxi. Semua itu diperoleh secara gratis ditambah bonus uang saku jutaan rupiah dalam setiap kali perjalanan. Menjadi orang penting dan terhormat plus banyak harta adalah bonus tambahan.

Mereka, yang sedikit

pintar atau licik, bisa memanfaatkan status sebagai "orang penting" ini untuk memperoleh rekan bisnis dan menguasai saham-saham perusahaan tanpa harus menyetor dana. Caranya dengan menjadi calo pengurusan izin atau menguasai izin bisnis terutama yang berhubungan dengan bisnis menjual "tanah air" (pertambangan dan lahan perkebunan atau bisnis lain yang erat berhubungan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam), termasuk kemudahan menjadi kontraktor proyek-

Hampir semua pelamar kerja pada saat pengujian di tahap wawancara ketika diberi kesempatan bertanya, langsung menanyakan tugas tanggung jawabnya dan selalu di akhiri dengan pertanyaan

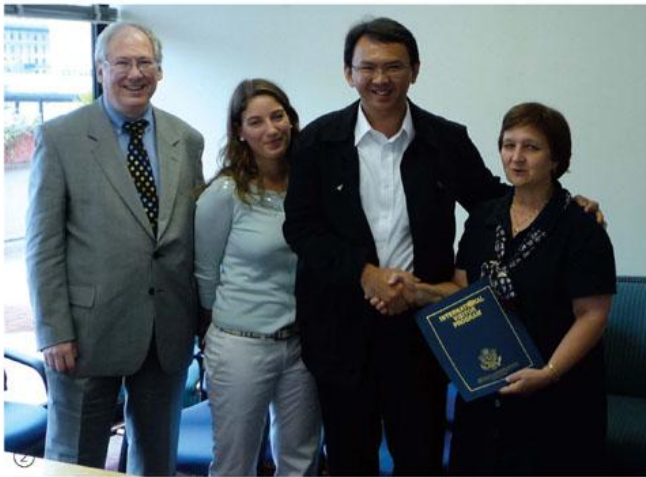
jumlah gaji, fasilitas dan tunjangan yang bisa ia dapatkan jika diterima.

Bayangkan jika saudara mendapatkan penawaran pekerjaan yang bisa mengharumkan nama baik saudara dan keluarga, bisa memuaskan hasrat hati nurani untuk menolong rakyat yang tidak mampu mendapatkan haknya. Pekerjaan itu juga menawarkan kondisi gaji, fasilitas dan tunjangan sebagai berikut: Fasilitas gaji 4x lebih besar dari pekerjaan lain pada umumnya. Ada tunjangan kendaraan, tunjangan sewa rumah (sekalipun itu sewa rumah sendiri), tunjangan komunikasi dari perangkat komunikasi sampai pulsa. Kadang-kadang jumlah tunjangan BBM (bahan bakar minyak) bisa lebih dari cukup untuk bisnis sampingan dengan membuka kios BBM eceran. Juga ada formulir pengajuan kredit dari bank yang siap ditanda-tangani sebelum bekerja secara resmi dan sudah langsung disetujui minimal Rp.100.000.000,- yang boleh digunakan untuk apa saja termasuk untuk keperluan kredit konsumtif seperti beli mobil dan perbaikan rumah, atau sesukanya.

Disamping semua fasilitas di atas ada lagi tambahan khusus, seperti:

Setiap bulan pasti melakukan





① Areal pabrik milik Ahok bersama keluarga yang banyak membuka lapangan pekerjaan baru serta menyedot banyak tenaga kerja
 ② Menerima sertifikat sebagai International Visitor Leadership program Grassroots Democracy, Campaigns and Elections dari U.S. Department of State di Amerika Serikat bulan September 2008.

proyek, baik swasta maupun pemerintah. Jika lebih jeli lagi dan memiliki sedikit hobi, juga akan mudah mendapatkan bantuan ternak/bibit unggul perkebunan dari swasta maupun Pemerintah.

Apa pekerjaannya? dan apa nama perusahaannya? Pekerjaan itu adalah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terhormat di "perusahaan" Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, sekalipun

mayoritas pemiliknya tidak merasa atau tidak menyadari memiliki "perusahaan". Sehingga yang bekerja merasa tidak memiliki atasan (yang seharusnya adalah rakyat), dan bebas menentukan berapapun fasilitas yang mereka kehendaki sejauh tidak menyinggung pekerja lain dan asal diputuskan secara bersama-sama antara pelaksana dan pengawas).

Tentu saja harus secara halus dan tidak menyinggung pekerja di bagian lain

sehingga bisa berakibat masuk penjara secara berjamaah. Dalam prakteknya, rakyat pemilik sudah tidak berhak mencampuri, kecuali setiap 5 tahun sekali dalam pesta "pemilik" yang dinamakan Pemilu atau pilkada langsung dan pilpres. Para "pekerja" ini diuntungkan oleh banyaknya rakyat yang tidak tahu/tidak sadar/tidak mau peduli bahwa "perusahaan" NKRI ini adalah milik mereka dan anak cucu mereka.

Kenapa hal ini umum bisa terjadi di setiap cabang "perusahaan" (daerah kabupaten/kota)? Sebagian dikarenakan kaum yang idealis sejati (bukan yang idealis karena belum kebagian pekerjaan/rezeki) tidak bersedia melamar kerja di "perusahaan" NKRI ini. Bayangkan jika semua kaum idealis yang ingin membesarkan NKRI masuk kedalam DPRD sebagai anggota, dengan bersyukur dan puas menikmati gaji yang sudah 4x lebih besar dari pada mereka bekerja di perusahaan biasa. Bayangkan pula, apa mungkin dalam jangka waktu 5 tahun telah bisa mencapai posisi eksekutif puncak di perusahaan? tentu saja tidak mudah, apalagi bekerja di perusahaan besar, untuk dikenal oleh pemilik saja sangat sulit.

PENGALAMAN LANGSUNG

Pengalaman saya setelah masuk menjadi anggota DPRD dengan tidak memanfaatkan fasilitas tunjangan yang seharusnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat telah mengantar saya menjadi bupati. Setelah mengundurkan diri dari jabatan bupati, langsung mendapat tawaran posisi eksekutif puncak di bawah pemilik langsung di perusahaan besar.

Semua lulusan pasca sarjana bermimpi bisa memperoleh posisi/jabatan eksekutif puncak dan dipercaya langsung oleh pemiliknya. Saya telah memotong kompas karena pernah menjadi anggota DPRD dan Bupati yang jujur. Inilah yang membuat para pemilik perusahaan menawarkan pekerjaan kepada saya. Salah seorang pemilik perusahaan itu pernah berkata: "banyak yang lebih pintar dan muda dari kamu, tetapi kamu telah terbukti bisa mengatur pemerintahan dengan rakyat banyak yang tidak kamu gaji. Apalagi mengatur rakyat yang kamu gaji di perusahaan sebagai pegawai/staf, tentu kemampuan manajemenmu akan lebih baik disamping sewaktu menjadi bupati kamu juga terbukti sebagai penyelenggara negara anti korupsi, apalagi di swasta. Karena bagimu nama baik lebih berharga dari pada harta kekayaan hasil tipuan/hasil rampokan harta rakyat".

Untuk menjadi anggota DPRD tk II bisa hanya dipilih 1000 pemilih, bahkan kurang dari itu sudah ada kemungkinan untuk dapat terpilih (khususnya diluar pulau Jawa dengan penduduk sekitar 100

Intinya gaya hidup jangan berubah jadi Orang Kaya Baru.

ribuan). Persaingan akan lebih mudah lagi jika saudara memilih Partai politik yg menerapkan suara tertinggi yang dilantik menjadi anggota DPRD bukan berdasarkan nomor urut di susunan calon legislatif. Peluang menjadi calon legislatif terbuka lebih besar karena banyak partai yang tidak dapat menyusun sampai 120% dari jumlah anggota DPRD dari sebuah kabupaten/kota. Disamping itu, banyak partai lebih suka memiliki DPRD yang berijasah diploma apalagi sarjana S1 dan S2. Lebih Lagi jika saudara yang idealis adalah perempuan. Ada kewajiban Undang-Undang yang mewajibkan 30% dari seluruh caleg adalah perempuan bahkan dengan urutan wajib setelah 2 laki-laki harus 1 perempuan.

Masih ragu? Ada UU yang menjamin jika seorang caleg bisa mendapatkan 30% suara dari BPP (bilangan pembagi pemilih) maka dia sudah bisa jadi sekalipun urutannya dibawah, asal

urutan caleg diatasnya kalah perolehan suara darinya. Bagaimana jika tahun 2009 gagal? Saudara masih bisa menjadi pengurus partai yang juga terhormat dan akan medapat fasilitas dari pemerintah (bantuan dana dari APBD untuk partai politik) sambil menunggu pemilu di tahun 2014?

Dari semua fasilitas dan peluang diatas, para kaum idealis nasionalis sejati harus ingat: Setelah terpilih mendapatkan karir yang hebat ini jangan jam tangan diganti dengan jam tangan mewah seharga puluhan juta rupiah, telepon genggam canggih dan mahal jika tidak bisa memanfaatkan teknologinya. Apalagi mulai memakai baju, dasi, sepatu seharga puluhan juta. Intinya gaya hidup jangan berubah jadi Orang Kaya Baru.

Apalagi hobi mendapat pacar baru, yang tadi tidak laku tiba-tiba jadi laku dan merasa ganteng dan hebat ditaksir gadis-gadis muda.





PARTAI IDEAL

Partai yang kita pilih adalah partai yang dalam berkampanye terbukti: Menyuarakan perjuangan mempertahankan NKRI, PANCASILA dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Ingat: Simbol Burung Garuda diciptakan untuk sejajar dengan burung elang Amerika Serikat. Hal ini bisa terwujud jika pita Bhinneka Tunggal Ika tidak kita buang. Sebab jika kita buang pitanya, nanti burung Garuda Pancasila kita menjadi bingung, goyang dan jatuh.

Setelah menemukan partai politik yang tepat, lalu bagaimana dengan pola kampanye yang sebaiknya Anda lakukan? Bagi saudara yang telah lulus diploma atau sarjana, kembalilah ke kampung halaman untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di pemilu 2009. Dengan prinsip mendidik rakyat memilih berdasarkan BTP (Bersih Transparan Profesional) bukan berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Artinya kita memilih melakukan suara "fungsi nabi" (*prophetic voices*) bukan "political voices" (suara politik yang haram halal hantam saja yang penting menang).

Jika saudara tidak mengikuti cara di atas, melainkan mengikuti cara berpilih gaya oknum di orde baru, maka setelah saudara duduk sebagai anggota DPRD, saudara akan dipaksa menjadi "robin hood" yang mencuri dari APBD atau memeras orang kaya untuk bisa menghidupi konstituen pemilih bahkan yang tidak memilih saudara tetapi setelah saudara duduk mereka mengaku memilih saudara dan meminta jatah rezeki saudara. Asuminya, karena saudara bisa duduk juga dengan cara menyuap mereka dengan bantuan-bantuan sembako, uang, dan lainnya.

Selamat berjuang kaum idealis, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan anda agar bangsa dan negara ini sejajar dengan Amerika Serikat.



14

PIDATO PILIHAN SELAMA SEBAGAI BUPATI

[CATATAN SANG SEKRETARIS ATAS PIDATO
TANPA TEKS]

PIDATO SAMBUTAN BUPATI BELITUNG TIMUR

ACARA : PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 2005

TEMPAT: HALAMAN PEMDA BELTIM

PUKUL : 09.00 WIB

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, 77 tahun yang lalu, pemuda-pemuda kita dengan berani bahkan sangat gagah berani mau melepaskan suatu kebanggaan pribadi, kesukuan atau keegoisan dari kaum mayoritas untuk menerima suku-suku kecil untuk disatukan menjadi bangsa Indonesia. Dimana suatu resei Yong Java, pemuda Jakarta mau menerima Yong Ambon, Yong Bangka mau menerima Yong Batak dan Yong-Yong yang lainnya dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk mewujudkan Indonesia bersatu.

Saya yakin, kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak akan terjadi kalau tidak ada sekelompok pemuda yang ikhlas melepas keegoisannya. Saya bayangkan jika kita ditempatkan pada posisi saat itu, apakah kita ikhlas disatukan dalam satu suku bangsa. Kita ambil contoh di pilkada, kalau menerima pegawai harus putra asli daerah. Jika hal itu sampai terjadi 77 tahun yang lalu maka Sumpah Pemuda tidak akan terwujud, karena masing-masing masyarakat bersikap "Saya Mau Suku Saya".

Pada masa revolusi kemerdekaan, senjata yang didapat dari Jepang atau Belanda sangat tidak memadai untuk berperang, dan pada saat yang sama tidak pernah ada kejadian, para pemuda saling baku tembak, saya coba bayangkan kembali kalau kita berada pada waktu itu.

Saya adalah suku yang kuat, maka saya akan membekali diri saya dengan senjata yang otomatis. Sedangkan suku yang kecil hanya menggunakan senjata bambu runcing. "Hei kamu suku kecil kamu saya bayar saja dan saya pelihara kamu. Jika hal itu terjadi maka Belanda tidak perlu menembakkan satu peluru pun tapi cukup menonton karena sudah saling baku hamtam dan baku tembak sesama kita. Maka dari itu kemerdekaan tidak akan terwujud.

Untuk itu, kita yang berada di kehidupan sekarang patut bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila. Kita bangun bangsa ini dengan pondasi yang kuat dan kokoh sebagaimana yang dicetuskan para pemuda terdahulu. Kita bangun Indonesia dengan pondasi Pancasila.

Saya yakin dengan peringatan Sumpah Pemuda ini, kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan Bangsa Indonesia bangsa yang besar.

Berkaitan dengan ini, para pemuda sekarang harus membangun bangsa ini dengan belajar teknologi dan lain sebagainya. Karena belajar merupakan transisi menuju kesuksesan.

Dan yang terpenting untuk membangun bangsa ini tidak harus melihat suku, agama, ras tapi lihatlah kita sebagai satu bangsa yaitu Indonesia.

Mari kita perbaiki diri, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia ke depan dapat jaya. Sebagai pemuda, mari kita menjadi teladan, contoh dalam membangun bangsa.

Demikianlah, sekian dan terimakasih.



PIDATO SAMBUTAN BUPATI BELITUNG TIMUR

ACARA : PELEPASAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TEMPAT : RUANG SIDANG PEMKAB BELTIM

WAKTU : SELASA, 20 DESEMBER 2005

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenannya, pada pagi ini kita dapat bertemu di ruang sidang ini dalam rangka "Pelepasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Belitung Timur" yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah Haji.

Merupakan suatu anugrah dan hidayah yang sangat besar bagi kaum muslim sekalian untuk bisa menunaikan salah satu rukun Islam yaitu melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah.

Berangkat ke Tanah Suci adalah dambaan terbesar bagi seluruh umat Islam yang beriman. Namun, untuk menuju cita-cita itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Ada proses yang harus dijalani setiap orang untuk mendapatkan hidayah dan panggilan dari Yang Kuasa untuk dapat segera menunaikan ibadah haji.

Walaupun ada, kaum muslim memiliki kecukupan materi sebagai dana untuk bisa menempuh Tanah Suci, tetapi itu bukan satu-satunya modal utama karena yang paling penting adalah panggilan hati nurani dan hidayah dari Yang Maha Kuasa.

Hadirin semuanya, bagi para jamaah calon Haji patut bersyukur bahwa bapak dan ibu sekalian diberi panggilan, kesempatan pada tahun ini sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan niat tulus untuk menyempurnakan ibadah sebagai umat muslim.

Tentu saja, semua ibadah yang dilaksanakan hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Yang Maha Kuasa semata.

Dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada calon jamaah haji semua untuk selalu menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji. Karena sebagaimana diketahui perubahan suhu dan iklim di sana tidak sama dengan di tanah air. Jadi, kesehatan harus diperhatikan dan jangan lupa banyak minum air dan makan buah-buahan.

Kami disini akan berdoa semoga para jamaah dapat melaksanakan semua syarat dan rukun haji tanpa mendapat halangan dan hambatan apapun serta dapat tiba kembali ketanah air dengan keselamatan dan kebahagiaan.

Dan kami juga menitipkan doa kepada para calon jamaah haji ketika berada disana untuk mendoakan negeri kita, bangsa Indonesia agar selalu diberi keselamatan dari berbagai bencana yang tidak diinginkan dan semoga masyarakat Belitung Timur khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya selalu diberi keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian rakyatnya.

Semoga, para calon jamaah haji ini setibanya di tanah air menjadi haji yang mabrur serta dapat melaksanakan amal kebaikan lebih meningkat lagi setelah menjalankan ibadah haji.

Selain daripada itu, kami berharap para jamaah haji selalu dapat menjaga citra bangsa kita yang rukun dan damai yang mengedepankan rasa persatuan dan kekompakan, saling tolong menolong sesama jamaah haji sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan secara sempurna.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan kami atas nama pemerintah beserta masyarakat Belitung Timur dengan penuh rasa bangga dan haru diiringi doa restu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin!



15

AHOK HARAPAN RAKYAT KECIL

[CATATAN KEKAGUMAN SEORANG SEKRETARIS TERHADAP PERJALANAN HIDUP SANG PEMIMPIN]

Orang tuanya bernama Indra Tjahaja Purnama (Cung Kim Nam) (alm), ibunya bernama Buniarti Ningsih (Bun Nen Caw).

Ayahnya seorang pengusaha sukses yang cukup dikenal di Pulau Belitung saat itu karena kepeduliannya terhadap masalah sosial yang dialami masyarakat kurang mampu dan dekat dengan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini pun diturunkan kepada Ahok, yang sejak kecil saat duduk di bangku

sekolah dasar sudah suka menolong teman-temannya yang kesulitan ekonomi. Hingga sekarang sifat dermawannya tak akan pernah surut, bahkan saat menjabat bupati pun uang dari kantong pribadi pun dikeluarkannya untuk membantu rakyatnya yang tertimpa kesulitan.

Ahok yang menikah dengan Veronica, ST, kelahiran Medan, Sumatera Utara, 6 September tahun 1977 ini, telah dikaruniai dua putra, Nicholas (1998) dan Daud (2006) serta seorang putri, Nathania (2001).

Sosoknya ramah, energik dan smart. Figurnya banyak dikenal masyarakat di tanah air melalui kiprahnya ketika menjabat Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Ia pernah menghentakkan Indonesia pertengahan 2005 lalu. Sebab, putra keturunan Tionghoa ini, berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana mayoritas penduduk daerah yang baru dimekarkan ini 93% adalah muslim. Ini memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia.

Dibawah kepemimpinannya, berbagai gebrakan dan terobosan yang menyentuh dan dirasakan masyarakat secara langsung dilakukan, terutama berkaitan dengan kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan birokrasi pemerintah daerah pun ikut dibenahi untuk menciptakan pola kerja aparatur yang profesional, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ahok, itulah sapaan akrab yang melekat dari sosok anak negeri dengan nama lengkap Ir Basuki Tjahaja Purnama MM. Ia lahir di Manggar, ibu kota Kabupaten Belitung Timur 29 Juni 1966. Anak pertama dari empat bersaudara ini didik dalam lingkungan keluarga yang toleran dengan keragaman agama dan etnis.

Bupati sejati yang mau bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. (dokumentasi fotografer majalah Tempo)







① Membicarakan bijih besi dengan salah satu karyawan, satu dari sekian banyak bisnis yang dilakukan dalam area pabrik miliknya.
② Berbincang dengan petani setempat yang sejak dulu selalu ia perjuangkan nasibnya.

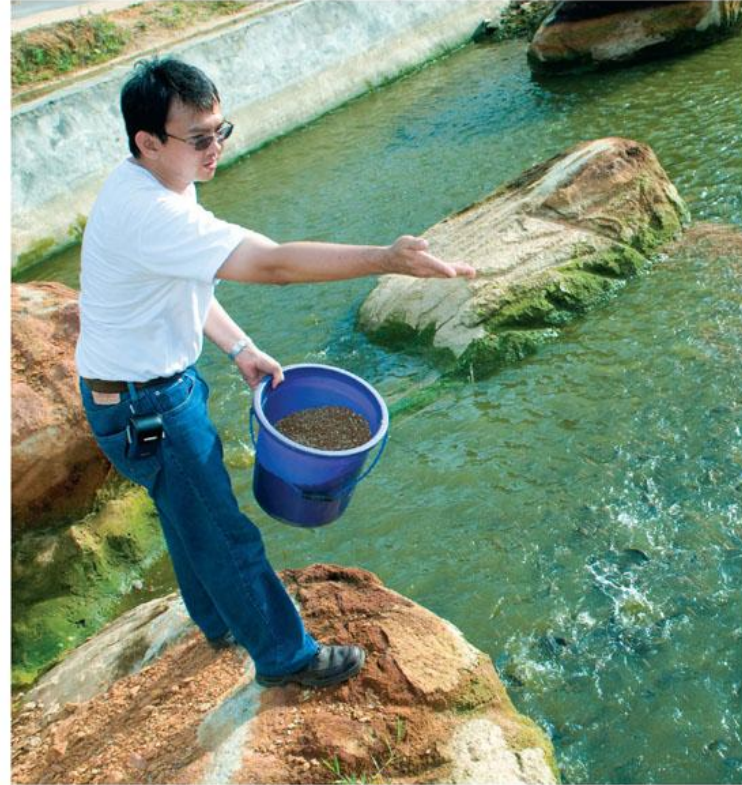


KARIR

Setamat dari sekolah menengah pertama, Ahok melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Kemudian kuliah di Universitas Trisakti pada Fakultas Teknologi Mineral (sekarang Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi) jurusan Teknik Geologi. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1989, dengan menyandang gelar Insinyur, Ahok pulang dan menetap di kampung halaman dengan mendirikan perusahaan CV Panda, bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah. Keputusannya pulang kampung karena ingat akan pesan almarhum ayahnya, "Jangan pernah lupa pada kampung halaman. Kamu boleh ke mana saja asal jangan lupa pulang untuk membangun kampung halaman."

Nasihat ini merupakan pesan yang diikuti oleh Ahok dan adik-adiknya Dr Basuri T Purnama, dokter spesialis PNS di Kab Belitung Timur, Fifi Lety SH. LL.M, praktisi hukum, Harry Basuki MBA praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan. Sehingga setelah menyelesaikan studi mereka pulang untuk berbakti dan berkarya dikampung halamannya.

Ahok sempat menggeluti dunia kontraktor tambang timah selama dua tahun. Ia menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi untuk membangun daerah yang ada dibenaknya, karena untuk menjadi pengelola mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional. Untuk itu, ia pun memutuskan mengikuti pendidikan S-2 bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Business Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM), membawa Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit



listrik, sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Karena ingin konsentrasi bekerja dan membangun daerah, pada tahun 1995 Ahok memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Ia mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Bagi Ahok, pabrik yang berlokasi di Dusun Gunung Nayo, Desa Air Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan *stakeholder* (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan almarhum Wasidewo, untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya

Jangan pernah lupa pada kampung halaman.



suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik) di Belitung Timur.

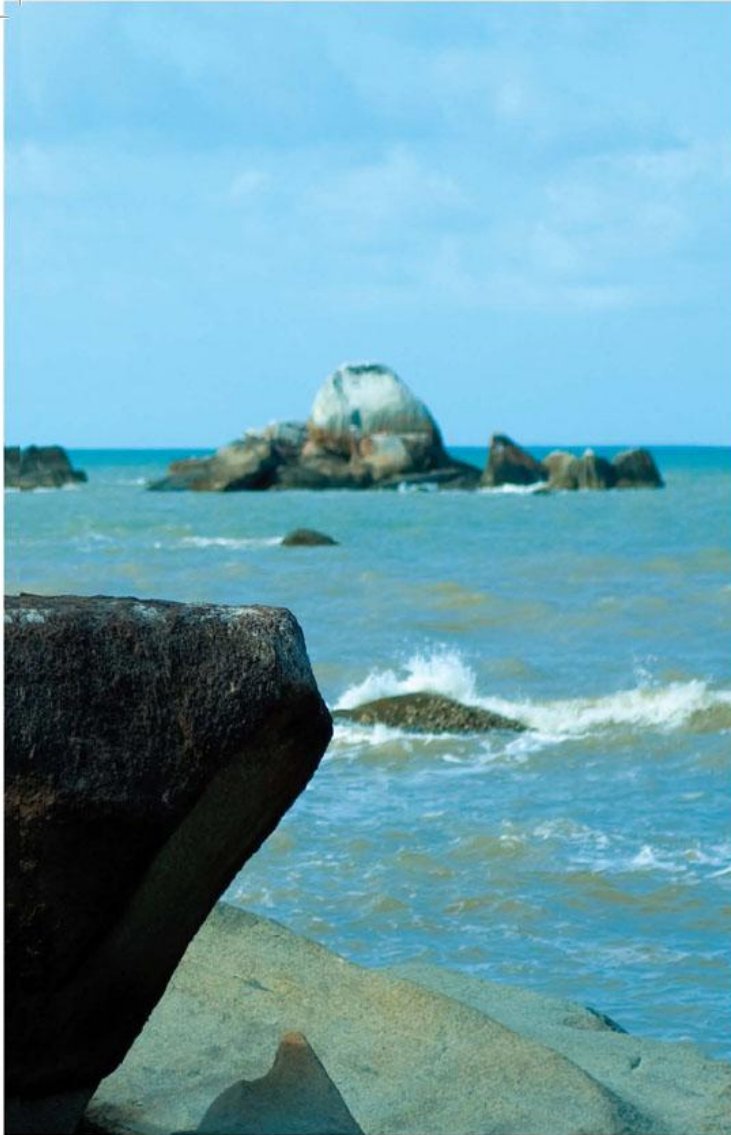
Akhir tahun 2004 investor Korea telah berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (peleburan bijih timah) di KIAK. Hal ini dilakukan untuk menaikkan harga bijih timah tambang rakyat di pasaran Belitung, sehingga nantinya akan meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat. Investor asing asal Korea ini tertarik dengan konsep yang disepakati

untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK. Sukses menjadi pengusaha, tak lantas mengurangi tingkat kepedulian kepada sesama.

Lambat laun Ahok menyadari menjadi pengusaha tidak akan dapat berbuat banyak, karena dana yang ia miliki untuk membantu orang lain terbatas. Saat menjadi pengusaha ia sempat sombong dengan keuntungan Rp 1 miliar sudah

bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun ternyata dari dana tersebut bantuan untuk diberikan kepada masyarakat kurang mampu ternyata masih kurang. Ia tergerak memikirkan bagaimana caranya agar bisa membantu mensejahterakan rakyat banyak.

Menurutnya, salah satu cara adalah dengan menjadi pejabat negara. Ia pun teringat akan pesan almarhum ayahnya "Kamu cocoknya jadi pejabat. Karena



pengusaha mau pikiran rakyat banyak, itu tidak mungkin". Ia berpikir, jika hanya diam saja berpangku tangan melihat kondisi bangsa ini dari waktu ke waktu bukannya semakin membaik, tidak akan merubah apapun. Baginya saat inilah ia bertindak untuk bangsa tercinta.

Tahun 2003, saat gaung reformasi menggelegar hingga ke penjurut tanah air, Ahok mencoba terjun ke dunia politik bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB),

dengan menduduki jabatan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang PPIB Kabupaten Belitung Timur. Inilah titik awal karir seorang Ahok di dunia politik. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tanpa disangka ia terpilih untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Keinginan Ahok untuk terjun ke dunia politik awalnya sempat tidak mendapat restu dari ibundanya yang tercinta, karena

lebih menginginkan Ahok berbisnis saja. Namun akhirnya hati sang ibu luluh juga ketika mendengar alasan yang dikemukakan oleh sang anak. Ahok mengatakan, ibunya egois jika berpikiran begitu. Kalau nanti tambang timah di Belitung Timur ini sudah habis, rakyat mau makan apa? Kalau saya sih mampu pindah ke Jakarta. Tapi apa jadinya dengan mereka yang tidak mampu, rakyat kecil yang bergantung dari hasil penambangan bijih timah. Bagaimana?

Ketika menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Belitung Timur, ia dikenal sebagai seorang politisi yang bersih. Ia dan rekan satu partainya pernah mengembalikan sisa uang perjalanan dinas dari kunjungan kerja ke Malang-Jawa Timur (dikutip dari www.kompas.co.id, edisi Senin 8 Agustus 2005). Pengembalian uang sisa perjalanan dinas ini bukan suatu hal yang dianggap baik dan wajar oleh rekan lainnya yang di DPRD, malah ia dimusuhi dan dikucilkan oleh rekan-rekan anggota DPRD lainnya. Oleh pimpinan melalui rapat internal di DPRD, ia tidak diperkenankan menjabat sebagai pimpinan dalam alat kelengkapan DPRD, baik itu komisi atau fraksi.

Tak hanya sekedar dikenal sebagai politisi yang bersih, ia juga dikenal vokal menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Suatu hari terjadi demo oleh para pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Belitum, menuntut masalah upah yang dibayar di bawah upah minimum kabupaten. Saat itu, tidak ada anggota DPRD yang keluar untuk menghadapi para pengunjuk rasa. Lalu, Ahok memutuskan untuk menemui para buruh tersebut untuk berdialog, lalu mengeluarkan sejumlah uang dari kantongnya guna membeli nasi bungkus untuk diberikan kepada para pengunjuk rasa. Dan ia pun akhirnya berhasil memperjuangkan kenaikan upah para buruh perkebunan kelapa sawit sesuai UMK (dikutip dari www.kompas.co.id, edisi Senin 8 Agustus 2005).

Ternyata menjadi wakil rakyat di DPRD, bagi seorang Ahok tidaklah cukup untuk bisa ikut menyejahterakan rakyat. Belum lagi persoalan tidak sejalannya pemikiran, ide dan sikap dengan anggota dewan yang lainnya. Ditambah pola kerja penggunaan anggaran APBD oleh pemerintah daerah yang tidak memihak kepada rakyat. Ia pun banting setir mencalonkan diri sebagai bupati pada pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Belitung Timur tahun 2005.



Tekad kuatnya ingin membangun Kabupaten Belitong Timur, menggiring lulusan geologi ini menjadi orang etnis Tionghoa pertama di Indonesia yang terpilih menjadi bupati berpasangan dengan Khairul Effendi, BSc dari PNBK dengan mengantongi suara 37,13 persen. Namun jabatan Bupati Belitong Timur hanya di embannya kurang lebih dari 16 bulan, pada tanggal 22 Desember 2007 ia secara resmi mengundurkan diri dari kursi jabatan tersebut, karena ikut mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah Provinsi Bangka Belitung 2007-2012, sebagai calon gubernur berpasangan dengan Dr.Ir. Eko Cahyono., M.Eng. Namun rupanya, ia tidak berhasil terpilih dalam pertarungan tersebut dan hanya memperoleh suara pada urutan ke dua

dengan prosentase 32,62%, kalah dengan jumlah 14.000 suara.

Kekalahan Ahok pada pemilihan kepala daerah Provinsi Bangka Belitung diduga karena banyaknya terjadi kecurangan. Dan hal ini telah disampaikan di Mahkamah Agung. Hasil dari putusan Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh Ahok, karena hal tersebut diluar kewenangan Mahkamah Agung. Sebagaimana dikutip dari Harian Pagi Pos Belitong edisi Jumat, 6 April 2007 :

..Yang menjadi kewenangan MA adalah sengketa penghitungan suara. Pelanggaran lain seperti pelanggaran administrasi dan prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara di luar jangkauan MA untuk memeriksa," ujar Djoko Sarwoko saat

membacakan putusan dalam sidang terbuka, Kamis (5/4), di gedung MA. Sidang dipimpin oleh hakim agung Paulus Efendi Lotulung. Pasangan Basuki-Eko Cahyana meminta MA membatalkan hasil Pilkada Bangka Belitung. Mereka menengarai adanya upaya sistematis yang dilakukan KPUD untuk menghilangkan hak pilih warga Bangka Belitung. Pasangan itu mengajukan bukti dokumen dan sejumlah saksi untuk mendukung dalilnya.

Menurut majelis hakim, persoalan-persoalan teknis pemilihan terjadi jauh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Menurut ketentuan UU 32/2004, hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu. Kewenangan MA seperti tercantum dalam pasal 106 ayat 2 UU 32/2004 terbatas hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil terpilihnya pasangan calon. "Ada kata 'hanya' dalam pasal 106 ayat 2 yang membatasi kewenangan MA. Kata itu membuat MA tidak terbuka untuk melakukan multiinterpretasi," ujar Djoko.

Basuki saat diminta komentarnya usai sidang mengaku tidak kecewa karena sejak awal sudah mengetahui keputusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Ia justru merasa puas karena telah memberikan pelajaran politik, bahwa MA memiliki keterbatasan wewenang oleh Undang-undang yang disahkan oleh DPR (UU No 32/2004,Red)...

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang dugaan kecurangan yang disampaikan di Mahkamah Agung, pembaca bisa mengakses info di www.cdt31.org.

Setelah tidak terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung, ia tetap menekuni bisnis usahanya, Ahok mengembangkan karir politiknya di kancah nasional, dengan menempati kedudukan sebagai Sekretaris Jenderal Partai PIB. Namun itu tidak berlangsung lama, dikarenakan ia mengundurkan diri dengan alasan persoalan internal partai. Lalu mendirikan yayasan/LSM dengan nama Centre for Democracy and Transparency 3.1 (www.cdt31.org) dengan visi mewujudkan tokoh-tokoh yang BTP (Bersih Transparan dan Profesional) menjadi pejabat publik melalui pilkada langsung.



Di depan bendungan peninggalan Belanda, desa
Gantung. Tempat dimana Anki dibesarkan.

PENGHARGAAN

Selama menjabat Bupati Belitung Timur, Ahok beberapa kali mendapat penghargaan, sebagai bentuk apresiasi dari hasil dedikasi dan kerjanya memimpin Kabupaten Belitung Timur. Diantaranya adalah penerimaan PIN Emas dari Fordeka (Forum Demokrasi Kebangsaan) yang disematkan langsung oleh mantan ketua MPR RI yang juga tokoh reformasi Prof. Dr. Amien Rais di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2006. Penghargaan ini diberikan karena Ahok dianggap sebagai salah satu tokoh reformasi dari kalangan masyarakat Tionghoa, yang berhasil menjadi pemimpin dan mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai hal yang baik, sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam perjuangan reformasi.

Kemudian, ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi 2006 oleh Koalisi Kebersamaan Tiga Pilar Kemitraan. Penganugerahan Tiga Pilar Award, sebagai penyelenggara negara yang komit terhadap pemberantasan korupsi. Penyerahan award ini dilakukan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A Djalil pada tanggal 1 Februari 2007. Pemberian penganugerahan ini diberikan kepada Ahok, karena dinilai berhasil menjalankan praktik anti korupsi.

Tidak hanya itu saja, Ahok juga dinobatkan sebagai 10 Tokoh Pilihan Yang Mengubah Indonesia versi Majalan Tempo 2006 edisi khusus tokoh pilihan. Terpilihnya Ahok, karena kiprahnya selama menjabat Bupati Belitung Timur. Ia berhasil menggebrak dua permasalahan utama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yakni, pendidikan dan kesehatan.

Dimana di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membebaskan biaya pendidikan hingga sampai SMA/SMK dan berobat gratis sampai dengan rumah sakit tingkat provinsi, dalam program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mengirim empat siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan belajar gratis di Universitas Trisakti Jakarta serta 10 orang siswa berprestasi di Universitas Bangka Belitung.

Selain pendidikan dan kesehatan yang mendapat porsi sekitar 40 persen dari jumlah APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menyediakan dana santunan kematian sebesar Rp 500 ribu, dengan syarat membuat akte kematian. Subsidi pembangunan rumah juga diberikan untuk keluarga kurang mampu.

Tak hanya itu, Ahok membuat kebijakan memberikan honor kepada ketua RT sebesar Rp 300 ribu/bulan, kepala dusun Rp 640 ribu/ bulan, dan kepala desa Rp 2 juta /bulan. Sisi lain Ahok dinilai menegakkan disiplin kerja yang cukup keras dikalangan pegawai Pemda Kabupaten Belitung Timur.

Beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Ahok, merupakan penghargaan yang berintegritas dan prestisius. Dan bukanlah penghargaan "kacangan", seperti penghargaan yang diperoleh dengan harus atau telah menyeter sejumlah uang kepada pihak penyelenggara.

"Di zaman sekarang ini banyak sekali berbagai macam penghargaan yang ditawarkan kepada kita, khususnya para pejabat. Namun penghargaan itu bukanlah murni karena penilaian dedikasi kinerja kita, tapi melainkan karena kita setor uang, ini namanya sama saja dengan korupsi (baca-sogok-menyo gok)," ungkap Ahok.



